

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**PENGUATAN BELA NEGARA DI ERA PANDEMI
GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL**

Oleh :

**R. WAHYU SUGIARTO., S.I.P., M.HAN
KOLONEL INF NRP. 1920026320369**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXII
LEMHANNAS RI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Proram Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII tahun 2021 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Perorangan (Taskap) dengan judul: **“PENGUATAN BELA NEGARA DI ERA PANDEMI GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tutor Pembimbing Taskap kepada para peserta PPRA LXII dan Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor: 63 Tahun 2021 Tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Judul Taskap peserta PPRA LXII Tahun 2021 Lemhannas RI.

Dalam kesempatan yang baik ini perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI tahun 2021. Ucapan yang sama juga Penulis sampaikan kepada Tutor Taskap kami, Bapak Marsda TNI F. Indrajaya, S.E., M.M, serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing dalam pembuatan Taskap ini sampai selesai, sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dihadapkan dengan latar belakang Penulis dalam penguasaan akademis dan terbatasnya waktu penulisan, maka kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan dari semua pihak, guna penyempurnaan penulisan naskah ini.


Besar harapan Penulis semoga Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran Penulis kepada Lemhannas RI, Pemerintah Republik

Indonesia khususnya Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, Kementerian Ristek Dikti, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Daerah termasuk bagi siapa saja yang barangkali membutuhkannya dalam rangka membahas tentang penguatan bela negara di era pandemi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbinganNya kepada kita, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai Bersama.

Sekian dan terima kasih, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juli 2021
Penulis


R. Wahyu Sugiarto., S.I.P., M.Han
Kolonel Inf Nrp. 1920026320369



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Wahyu Sugiarto., S.I.P., M.Han

Pangkat/NRP : Kolonel Inf Nrp. 1920026320369

Jabatan : Pamen Denma Mabesad

Instansi : TNI AD

Alamat : Jln. Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXII tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian Tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Juli 2021
Penulis



R. Wahyu Sugiarto., S.I.P., M.Han
Kolonel Inf Nrp. 1920026320369

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan dibawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Kolonel Inf. R. Wahyu Sugiarto., S.I.P., M.Han
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII
Lemhannas RI Tahun 2021
Judul Taskap : Penguatan Bela Negara Di Era Pandemi
Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional

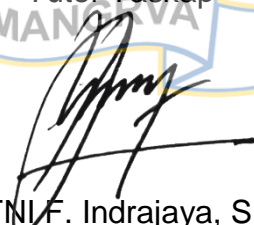
Taskap tersebut diatas telah ditulis "~~sesuai/tidak sesuai~~" dengan Petunjuk Teknis Tentang Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI, Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2021, karena itu "~~layak/tidak layak~~" dan "~~disetujui/tidak disetujui~~" untuk di uji.

"coret yang tidak diperlukan"



Jakarta, Juli 2021

Tutor Taskap


Marsda TNI F. Indrajaya, S.E., M.M
Tajar Bidang Hubungan Internasional

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Rumusan Masalah | 6 |
| 3. Maksud dan Tujuan | 6 |
| 4. Ruang lingkup dan Sistematika | 6 |
| 5. Metode dan Pendekatan | 7 |
| 6. Pengertian | 8 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 7. Umum | 10 |
| 8. Peraturan Perundang-undangan terkait | 10 |
| 9. Kerangka Teoretis | 12 |
| 10. Data dan Fakta | 17 |
| 11. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh | 19 |
| | |
| BAB III PEMBAHASAN | |
| 12. Umum | 27 |
| 13. Urgensi Bela Negara di Era Pandemi | 28 |
| 14. Implementasi Bela Negara di Era Pandemi | 37 |
| 15. Implikasi penguatan bela negara di era pandemi terhadap Ketahanan Nasional | 46 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| 16. Simpulan | 55 |
| 17. Rekomendasi..... | 56 |

DAFTAR PUSTAKA :

DAFTAR LAMPIRAN :

1. ALUR PIKIR.
2. RIWAYAT HIDUP



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. KILAS BALIK PANDEMI DUNIA



GAMBAR 2. TIMELINE WABAH VIRUS CORONA



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, unsur bela negara merupakan sebuah aspek yang tidak dapat dipisahkan guna mewujudkan Tujuan Nasional. Secara umum, bela negara adalah sebuah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa cintanya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. Pada hakikatnya kesadaran bela negara wajib dimiliki oleh setiap warga negara. Hal ini merupakan amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 30, yang menyebutkan bahwa membela bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Meskipun identik dengan tindakan-tindakan luar biasa seperti partisipasi dalam perang, berkorban raga demi negara, dan menangkal ancaman musuh negara, nyatanya spektrum tindakan bela negara sangat luas, mulai dari yang paling halus hingga yang paling keras seperti tindakan yang telah disebutkan sebelumnya.¹ Apalagi jika mencermati perkembangan lingkungan strategis di era pandemi seperti saat ini, komitmen bela negara dari seluruh elemen bangsa menjadi semakin penting untuk diimplementasikan. Pandemi COVID-19 merupakan musibah kesehatan yang memberikan berbagai dampak negatif secara meluas, mulai dari kesehatan masyarakat, pendidikan, ekonomi, hingga keamanan.

Sampai 15 Juli 2021, total kasus positif di Indonesia mencapai 2.726.803 kasus, dengan jumlah kesembuhan mencapai 2.176.412 kasus dan kasus meninggal mencapai 70.192 kasus.² Selain itu, Indonesia juga mengalami penurunan angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai minus 5 hingga minus 2 persen sejak kuartal ke-II dan ke-IV tahun 2020. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal IV tahun 2020 minus 2,19% secara

¹ Bela Negara: Pengertian, Unsur, Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Bela Negara, diunduh dari <https://www.wantannas.go.id/2018/10/19/bela-negara-pengertian-unsur-fungsi-tujuan-dan-manfaat-bela-negara/> pada 5 Februari 2020 pukul 16.35

² <https://covid19.go.id> diunduh pada 15 Juli 2021

year on year. Angka tersebut sedikit meningkat dibanding kuartal III dimana Indonesia tercatat minus 3,45%. Masih tingginya angka konfirmasi positif Covid-19 Indonesia sekaligus merefleksikan bahwa aspek 3T atau *testing, tracing* dan *treatment* yang dijalankan selama ini masih belum cukup optimal. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa bela negara sepenuhnya terimplementasikan dalam menghadapi masa pandemi.

Pandemi sendiri menurut A.M. Dumar (2009) adalah keadaan dimana sebuah penyakit atau suatu kondisi dapat menyebar infeksinya atau *transmittable* secara luas hingga melampaui batas-batas negara. Jadi indikator yang menjadi ukuran adalah penularan yang masif. Oleh karena itu sebuah penyakit meskipun telah merenggut banyak nyawa seperti penyakit jantung dan kanker tidak dapat dikatakan pandemi karena tidak bersifat menular³. Sedangkan Covid-19 sendiri menjadi sebuah era baru dari pandemi karena sifatnya yang bertahan dalam jangka waktu yang lama dan bahkan berpotensi menjadi endemi pada negara-negara tertentu. Karakteristik ini yang kemudian memaksa seluruh pihak dalam suatu negara untuk turut menghadapi pandemi Covid-19.

Oleh karena itulah diperlukan partisipasi seluruh komponen bangsa sesuai dengan peran, fungsi dan profesinya masing-masing untuk menjalankan nilai-nilai bela negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 Ayat 3 UUD NRI 1945 yaitu bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Menurut Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Sementara menurut Kementerian Pertahanan, bela negara adalah upaya untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme serta memiliki ketahanan nasional yang tangguh.⁴

³ A. M., Dumar, *Swine Flu: What You Need to Know*. Wildside Press LLC (2009)

⁴ "Bela Negara Dalam Perspektif Strategi dan Kebijakan Pertahanan Negara" *WIRA*, Edisi Khusus 2017.

Pelaksanaan bela negara dipengaruhi oleh persepsi ancaman kawasan dan perdebatan identitas diantara beberapa kekuatan negara. Negara yang cenderung memiliki persepsi ancaman tinggi cenderung menggencarkan program bela negara di masyarakatnya. Sementara itu, bela negara juga menjadi dasar nasionalisme yang kuat untuk mengatasi perbedaan identitas diantara masyarakatnya. Di era pandemi seperti saat ini, bela negara dapat ditransformasikan dalam bentuk dukungan terhadap serangkaian kebijakan Pemerintah. Terdapat beberapa kebijakan strategis yang penting untuk dipahami, ditaati dan dijalankan oleh masyarakat dalam upaya mengatasi pandemi, seperti: pemberlakuan PSBB dan PPKM Mikro, pelaksanaan vaksinasi, dan pemberian bantuan sosial.

Bagi elemen masyarakat, salah satu wujud bela negara yang paling penting dilakukan saat ini adalah kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan secara aktif. Meskipun terlihat sederhana, adanya kesadaran kolektif atas hal ini dapat menekan angka penyebaran virus yang tentunya akan meningkatkan pengendalian atas virus maupun implikasi lanjutannya. Hal ini juga ditegaskan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bahwa penerapan protokol kesehatan merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya bela negara yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Disiplin protokol kesehatan merupakan salah satu bentuk bela negara karena berkontribusi melindungi nyawa masyarakat dari bahaya penularan Covid-19.

Di samping itu, setiap orang juga dapat memanfaatkan keahlian dan keterampilannya dalam mendukung upaya negara guna melawan Pandemi Covid-19. Sebagai contoh, hasil inovasi para peneliti UGM dalam menciptakan perangkat tes cepat GeNose telah menjadi suatu terobosan yang lebih murah dan efektif dalam rangka menyaring potensi penyebaran virus. Implementasi bela negara juga dapat dilihat dari komitmen para tenaga kesehatan yang tinggi dalam pelayanan kesehatan.

GeNose bukanlah satu-satunya inovasi untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19. Inovasi berikutnya adalah *mobile* BSL-2. BSL-2 adalah laboratorium yang dibutuhkan untuk pengujian tes PCR. Hal ini penting untuk menyeimbangkan kemampuan *testing* dan *tracing* dengan penyebaran kasus

yang semakin tinggi. Selain itu, mobilisasi juga dapat membantu menjangkau wilayah Indonesia yang jauh dari pusat-pusat perkotaan.

Inovasi lainnya adalah *immunodulator* karya peneliti LIPI. Fungsi dari *immunodulator* adalah meningkatkan imunitas di dalam tubuh. *Immunodulator* terbuat dari sejumlah bahan herbal khas Indonesia dan sudah diuji klinis di Wisma Atlet. Sayangnya, inovasi ini belum mendapatkan izin edar dari BPOM. LIPI juga telah mengembangkan penghancur jarum suntik yang terus dikembangkan untuk bisa menjawab potensi sampah jarum suntik di masa vaksinasi Covid-19. Dengan vaksinasi yang ditargetkan mencapai 181 juta jiwa, potensi limbah jarum suntik juga semakin besar.

Periode pandemi Covid-19 juga tidak menyurutkan keberadaan inovasi di bidang kesehatan. Berdasarkan ajang *Indonesia Healthcare Innovation Awards* (IHIA) IV pada tahun 2020, terdapat 138 inovator yang berpartisipasi dalam rangka memberi dukungan kepada Pemerintah untuk penanggulangan pandemi Covid-19. 183 penemuan tersebut terbagi ke dalam lima kategori, yakni Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Alat Kesehatan, dan *Information and Communication Technology* (ICT) bidang kesehatan.⁵

Keberadaan pandemi juga memaksa inovasi-inovasi dalam bidang lain, seperti ekonomi dan pariwisata. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi digitalisasi yang besar. Keberadaan pandemi Covid-19 justru mendorong digitalisasi tersebut untuk terealisasi. Beberapa inovasi tersebut antara lain masifnya *e-commerce* lokal, aplikasi jasa pembayaran, aplikasi hiburan daring, aplikasi logistik, hingga aplikasi *virtual meeting* yang muncul di berbagai kampus. Hal ini dapat menunjang *startup* digital di Indonesia yang jumlahnya telah mencapai 2.196 *startup* dan lima diantaranya adalah *unicorn*.

Peran aktif masyarakat dalam membendung dan memberikan kontra narasi terhadap berita bohong (*hoax*) yang berkaitan dengan COVID-19 juga

⁵ Desi Purnamawati, "Pandemi Tidak Menyurutkan Inisiatif Inovasi Kesehatan di Ajang IHIA" *Antara*, 6 November 2020. Diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/1824468/pandemi-tidak-menyurutkan-inisiatif-inovasi-kesehatan-di-ajang-ihia> pada 30 Maret 2021

menjadi wujud lain dalam implementasi bela negara di era pandemi. Merebaknya pandemi Covid-19 membawa ketakutan bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Ketakutan tersebut menyebabkan masyarakat menjadi mudah untuk dipengaruhi oleh teori-teori konspirasi dan berita *hoax*. Pada periode Januari hingga November 2020, jumlah *hoax* yang tersebar di Indonesia mencapai 2.024 berita. LSM Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menyebutkan bahwa lebih dari sepertiga *hoax* yang beredar di Indonesia paling banyak ditemukan melalui media sosial *Facebook*.

Padahal, keberadaan *hoax* di tengah krisis kesehatan publik justru dapat memperparah krisis kesehatan tersebut. Di tingkat global, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut bahwa penyebaran informasi yang salah dan kabar bohong dapat membuat sekelompok orang menjadi korban kebencian dan prasangka. Guterres mendorong masyarakat dunia untuk mempercayai ilmu pengetahuan, kualitas vaksin, dan kinerja tenaga kesehatan yang selama ini telah berjuang untuk menangani pandemi Covid-19. Sementara itu, keberadaan *hoax* juga bisa dianggap sebagai bentuk penyerangan dan pengkhianatan terhadap tenaga medis dan pemerintah yang berusaha untuk menekan pandemi Covid-19. Keberadaan *hoax* justru akan membahayakan krisis kesehatan karena akan menimbulkan ketidakpercayaan yang masif di kalangan masyarakat.

Namun demikian, kesadaran dan komitmen bela negara yang diharapkan muncul secara masif masih dinilai relatif minim. Hal ini dapat tercermin dari masih rendahnya kedisiplinan banyak elemen masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Fenomena ini juga sekaligus menunjukkan kurangnya empati terhadap segala kesulitan yang diakibatkan di era pandemi. Kondisi ini dapat berimplikasi terhadap berbagai gatra ketahanan nasional bangsa Indonesia. Ketahanan pada aspek-aspek seperti ekonomi, sosial budaya dan kesehatan akhirnya menjadi semakin melemah. Kondisi ini dapat mengakibatkan situasi pandemi menjadi tidak kunjung terkendali, terhambatnya pemulihan perekonomian nasional, serta adanya potensi meningkatnya permasalahan lanjutan seperti kriminalitas dan pengangguran akibat terhambatnya laju ekonomi. Oleh karena itulah judul ini

penting untuk dikaji lebih lanjut dalam upaya menganalisis komitmen bela negara di era pandemi dan implikasinya terhadap Ketahanan Nasional.

2. Rumusan Masalah.

Apabila bentuk-bentuk bela negara di era pandemi masih minim, maka kemampuan suatu negara untuk melakukan manajemen krisis kesehatan akan semakin berkurang. Hal ini dikarenakan kurangnya dukungan dari masyarakat negara itu sendiri terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintahnya. Oleh karena itu, dengan mencermati uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah : “Bagaimana memperkuat bela negara di era pandemi, guna meningkatkan ketahanan nasional?”

Rumusan masalah tersebut selanjutnya dapat diidentifikasi lebih lanjut melalui sejumlah pertanyaan kajian sebagai berikut:

- 1) Apa Urgensi Bela Negara di Era Pandemi?
- 2) Bagaimana Implementasi Bela Negara di Era Pandemi?
- 3) Bagaimana implikasi penguatan bela negara di era pandemi terhadap Ketahanan Nasional?

3. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud. Pembahasan materi Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pentingnya penguatan bela negara di era pandemi, berikut analisis persoalan yang dihasilkan untuk dapat meningkatkan ketahanan nasional.

b. Tujuan. Tujuan penulisan Taskap ini adalah untuk menyampaikan konsep dan gagasan tentang penguatan bela negara di era pandemi, serta sebagai sumbangan pemikiran, bahan masukan dan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan untuk dapat meningkatkan ketahanan nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a. Ruang Lingkup. Adapun ruang lingkup pemahasan Taskap ini akan dibatasi pada aspek kesehatan masyarakat utamanya pembatasan mobilitas penduduk untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

b. Sistematika. Taskap ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling terkait antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, dengan sistematika sebagai berikut.

1) **Bab I : Pendahuluan,** Pada Bab ini akan disampaikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, pertanyaan kajian, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian untuk dapat menyamakan persepsi dalam memahami pembahasan.

2) **Bab II : Tinjauan Pustaka,** Pada Bab ini akan diuraikan tentang dasar-dasar pemikiran yang digunakan dalam penulisan Taskap, di antaranya adalah Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan materi bahasan. Dibahas pula mengenai data dan fakta serta kerangka teoretis yang bersumber dari kajian pustaka maupun referensi ilmiah yang terkait dengan materi bahasan. Selanjutnya akan diuraikan pengaruh perkembangan lingkungan strategis berdasarkan faktor eksternal maupun internal yang berada pada tataran global, regional dan nasional.

3) **Bab III : Pembahasan,** Pada Bab ini akan dianalisis secara detail setiap pertanyaan kajian terkait pentingnya penguatan bela negara di era pandemi sehingga dapat meningkatkan ketahanan nasional. Pembahasan yang dilakukan akan merujuk dari teori dan tinjauan pustaka sebagaimana uraian di bab sebelumnya. Hasil analisis ini nantinya akan dapat dirumuskan untuk pemecahan pokok-pokok bahasan, yang menggambarkan solusi secara logis, kongkrit dan kontekstual.

4) **Bab IV : Penutup,** Pada Bab ini berisi simpulan dari uraian penulisan dan beberapa rekomendasi yang diajukan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan.

5. Metode dan Pendekatan.

a. Metode. Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap ini menggunakan metode kualitatif, yaitu deskriptif analisis. Metode ini

menekankan pada pengumpulan dan analisis teks tertulis (studi kepustakaan) dari data sekunder.

b. Pendekatan. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dalam Taskap ini dilakukan dengan perspektif ketahanan nasional, yaitu melalui tinjauan yang berdasarkan pada aspek kesejahteraan dan keamanan, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoretis yang digunakan.

6. Pengertian.

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan menyatukan persepsi pada pembahasan selanjutnya, maka digunakan beberapa pengertian sebagai berikut:

a. Penguatan adalah proses, cara, perbuatan untuk menguatkan atau menguatkan.⁶ Kemudian, penguatan juga dapat diartikan sebagai suatu respon yang diberikan terhadap perilaku atau perbuatan yang dianggap baik, sehingga dapat membuat terulangnya atau meningkatnya perbuatan atau perilaku yang dianggap baik tersebut.⁷

b. Bela Negara adalah adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai ancaman.⁸ Bela negara menjadi salah satu hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan juga pengabdian sesuai profesi.⁹

c. Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Pandemi tidak ada hubungannya dengan

⁶ "Penguatan" *KBBI Web*. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/kuat> pada 31 Maret 2021

⁷ Udin S. Winata Putra, *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Universitas Terbuka (2005): 18

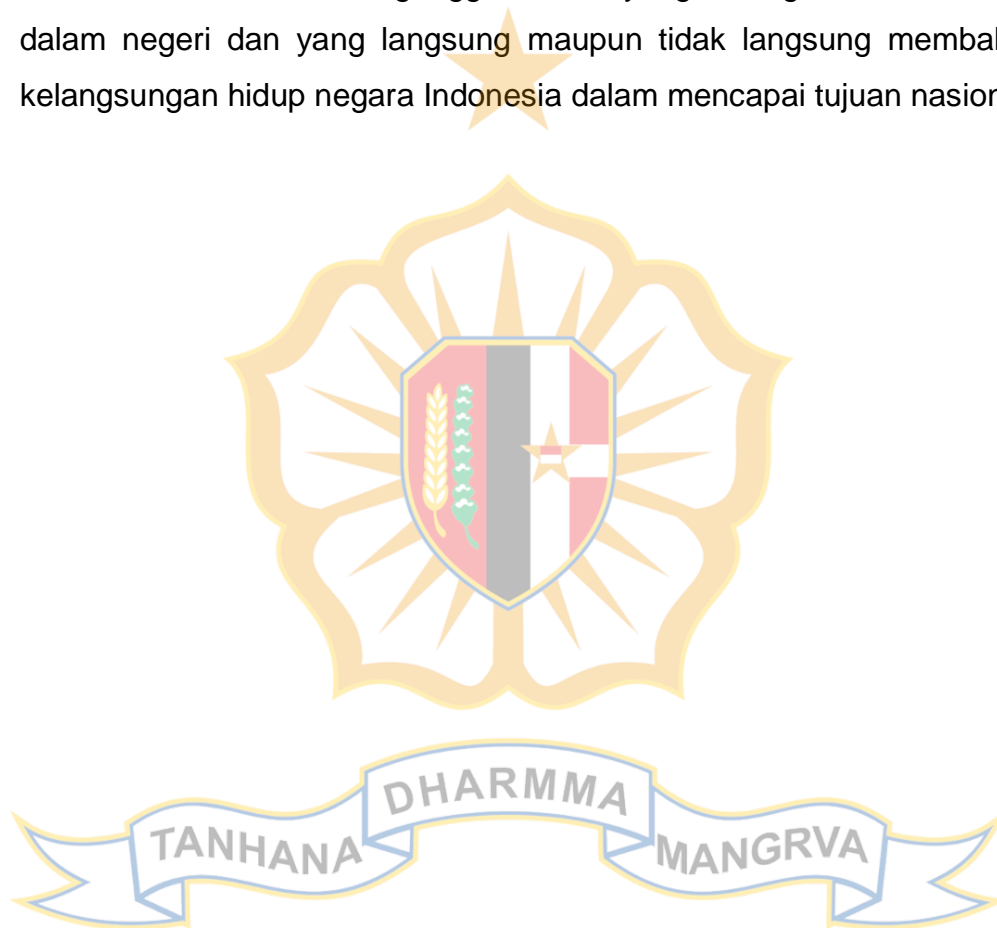
⁸ UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

⁹ UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi, namun pada penyebaran geografisnya.¹⁰

d. Inovasi, adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.¹¹

e. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan guna menghadapi dan mengatasi tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri dan yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup negara Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.¹²



¹⁰ Rizal Setyo Nugroho, "Apa itu Pandemi Global Seperti yang Dinyatakan WHO Pada Covid-19?" *Kompas*, 12 Maret 2020. Diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/060100465/apa-itu-pandemi-global-seperti-yang-dinyatakan-who-pada-covid-19?page=all> pada 31 Maret 2021

¹¹ UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

¹² Tim Pokja. *Geostrategi dan Ketahanan Nasional*. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2021.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Tinjauan pustaka dalam tulisan Taskap ini akan mencakup peraturan perundang-undangan, serta beragam data dan fakta yang terkait dengan inti pembahasan, kerangka teoritis, serta pemaparan mengenai lingkungan strategis. Tinjauan pustaka diharapkan dapat menunjukkan titik temu dari beberapa komponen tersebut yang kemudian membentuk asumsi awal pada proses analisis. Pemaparan peraturan perundang-undangan dapat memuat elaborasi mengenai pengertian-pengertian penting, hak dan kewajiban pihak-pihak terkait mengenai penguatan bela negara. Selanjutnya, data dan fakta yang berkaitan dengan bela negara di era pandemi dapat digunakan untuk memberikan gambaran terkini mengenai penanganan pandemi. Kemudian, kerangka teoritis digunakan sebagai paradigma yang menjadi dasar dari struktur pemikiran dalam menganalisis upaya menguatkan program bela negara di era pandemi guna meningkatkan ketahanan nasional. Tinjauan Pustaka akan ditutup dengan pemaparan mengenai lingkungan strategis global, regional, dan nasional yang dapat mempengaruhi penguatan bela negara di era pandemi. Dengan memahami seluruh komponen dari tinjauan pustaka di atas, analisis yang akan dilakukan diharapkan dapat menyorot hambatan dalam upaya penguatan bela negara di era pandemi guna meningkatkan ketahanan nasional

8. Peraturan Perundang-undangan Terkait.

a. UU RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Pasal 1 ayat (11) mendefinisikan bela negara sebagai tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam

menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman.

Selanjutnya, pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Nilai-nilai dasar bela negara perlu ditanamkan. Pasal 7 ayat (2) menyebut bahwa pembinaan kesadaran bela negara diselenggarakan di lingkup pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan. Lebih lanjut lagi, Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dapat bekerja sama dengan Pemda dan pihak lainnya dalam penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara.

b. UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 4 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Akan tetapi, tidak hanya pemerintah yang berperan dalam menyukseskan karantina kesehatan. Pasal 7 dan Pasal 8 menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak atas perlakuan yang sama dan mendapatkan pelayanan kesehatan, pangan, dan kebutuhan sehari-hari selama karantina. Sementara Pasal 9 menyebutkan bahwa setiap orang wajib mematuhi dan turut serta dalam penyelenggaraan karantina kesehatan.

c. UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 7 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dengan demikian, tugas TNI tidak hanya untuk berperang, melainkan juga terdapat operasi militer selain perang yang relevan untuk penanganan pandemi. Hal ini diantaranya disebutkan dalam poin-poin pasal 7 ayat 2 huruf (b) seperti misalnya membantu menanggulangi bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.

d. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Lampiran RPJMN tersebut menyebutkan bahwa pendidikan karakter dan budi pekerti di Indonesia belum mantap. Oleh karena itu, salah satu program yang diusung adalah peningkatan kualitas pendidikan sebagai pilar kebangsaan yang memiliki peran penting dalam menumbuhkembangkan semangat cinta tanah air dan bela negara, membangun karakter dan meneguhkan jati diri bangsa, serta memperkuat identitas nasional. Hal ini juga dituangkan dalam salah satu arah kebijakan strategis, yakni pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan bela negara melalui pembinaan Pancasila, peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan, serta membersihkan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara.

9. Kerangka Teoritis.

a. Konsep Bela Negara.

Menurut H. Kaelan dan Achmad Zubaidi, bela negara dapat didefinisikan sebagai tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi warga negara Indonesia, usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air (wilayah nusantara) dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara serta berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Untuk bisa melakukan bela negara, masyarakat harus memiliki kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan bela negara. Kemampuan tersebut dapat dibentuk melalui pendidikan bela negara melalui jalur formal, non-formal, maupun informal. Jalur formal adalah pendidikan di sekolah yang dilaksanakan melalui materi Pendidikan Kewarganegaraan. Sementara itu, jalur non-formal dilaksanakan melalui interaksi di masyarakat baik di instansi pekerjaan, organisasi sosial-politik, maupun organisasi massa. Sedangkan

untuk jalur informal, dilaksanakan melalui pendidikan keluarga inti melalui keteladanan orang tua dalam kehidupan rumah tangga.¹³

b. Teori Partisipasi Masyarakat.

Menurut Keith Davis, partisipasi adalah keterlibatan mental, pikiran, dan emosional seseorang dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk berkontribusi pada tujuan umum kelompok dan ikut berbagi tanggung jawab bersama di antara mereka. Konsep ini merupakan konsep yang penting dalam mengkaji tindakan bela negara di masa pandemi, karena pada dasarnya tindakan tersebut adalah bentuk partisipasi masyarakat sesuai dengan keahlian dan profesi masing-masing.

Pengertian lebih lanjut dijelaskan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi. Keduanya mengartikan partisipasi sebagai pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan, dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka sendiri, membuat keputusan secara adil, dan memecahkan masalahnya. Partisipasi masyarakat juga sejalan dengan prinsip demokrasi dalam kehidupan yang berpusat pada masyarakat.¹⁴

Terdapat beberapa jenis klasifikasi dalam partisipasi. Sundariningrum dalam Sugiyah mengklasifikasikan partisipasi berdasarkan keterlibatannya menjadi partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu-seperti mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, atau mengajukan keberatan-dalam proses partisipasi. Sementara itu, partisipasi tidak langsung berarti individu mendelegasikan hak partisipasinya kepada orang lain.

Klasifikasi berbeda diutarakan oleh Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Dwiningrum. Menurut mereka, partisipasi dapat dibedakan kepada empat jenis sesuai tahap partisipasi tersebut terjadi. Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga,

¹³ Suwarno Widodo, "Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme" *Jurnal Ilmiah CIVIS 1*, Vol.1 (2011)

¹⁴ Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Kurniawan (2005)

partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Terakhir, partisipasi dalam pengawasan dan evaluasi.¹⁵

c. Teori Ketahanan Nasional.

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar Tujuan Nasionalnya. Keadaan atau kondisi selalu berkembang dan keadaan berubah-ubah, oleh karena itu ketahanan nasional harus dikembangkan dan dibina agar memandai sesuai dengan perkembangan jaman. Jika kita mengkaji Ketahanan nasional secara luas kita akan mendapatkan tiga “wajah” Ketahanan Nasional, walaupun ada persamaan tetapi ada perbedaan satu sama lain:¹⁶

- 1) Ketahanan Nasional sebagai kondisi dinamis mengacu keadaan “nyata riil” yang ada dalam masyarakat, dapat diamati dengan pancaindra manusia. Sebagai kondisi dinamis maka yang menjadi perhatian adalah ATHG disatu pihak dan adanya keuletan, ketangguhan, untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi ancaman.
- 2) Ketahanan nasional sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan negara diperlukan penataan hubungan antara aspek kesejahteraan (IPOLEKSOSBUD) dan keamanan (Hankam). Dalam konsepsi pengaturan ini dirumuskan ciri-ciri dan sifat-sifat ketahanan nasional, serta tujuan ketahanan nasional.
- 3) Ketahanan Nasional sebagai metode berfikir, ini berarti suatu pendekatan khas yang membedakan dengan metode berfikir lainnya. Dalam ilmu pengetahuan dikenal dengan metode induktif dan deduktif,

¹⁵ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pendidikan*. Yogyakarta: Perpustakaan Pelajaran (2011)

¹⁶ Sigit Dwi Kusrahmadi, “Ketahanan Nasional”. Diakses melalui http://staffnew.uny.ac.id/upload/131655977/pendidikan/KETAHANAN+NASIONAL+UPT+MKU+Penting+Sekali+A1+04-02-06_0.pdf pada 1 April 2021

hal ini juga dalam ketahanan nasional, dengan suatu tambahan yaitu bahwa seluruh gatra dipandang sebagai satu kesatuan utuh menyeluruh.

d. Teori Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye dalam *Understanding Public Policy*, Kebijakan Publik dapat dimaknai sebagai apapun yang dipilih oleh negara atau pemerintah sebagai aktor politik untuk dilakukan atau tidak¹⁷. Karena terdapat unsur publik di dalamnya maka bisa dipastikan bahwa kebijakan publik harus berdampak terdapat masyarakat di dalam negara tersebut secara keseluruhan. Sedangkan menurut Andries Hoogerwerf dalam *Overheidsbeleid* atau Ilmu Pemerintahan, kebijakan publik adalah suatu tindakan pemerintah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi negara maupun untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu¹⁸.

Kebijakan publik kemudian dapat menjadi sebuah produk hukum demi pelaksanaannya agar terjadi kepatuhan dari publik atas kepentingan bersama tersebut. Tentu saja peraturan ini akan disertai dengan metode *punishment* juga sebagai sanksi apabila terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian. Pun demikian, kebijakan publik mulanya tidak bertujuan untuk memberikan hukuman kepada para pelanggar melainkan sebagai himbauan dan anjuran agar keselarasan antara pemerintah dan masyarakat dapat tercipta untuk kepentingan bersama.

e. Teori Komunikasi

Menurut James W. Carey dalam *Communication as Cultures: Essays on Media and Society*, komunikasi adalah pertukaran informasi antara dua entitas atau lebih sebagai bentuk proses hubungan sosial antara manusia dengan manusia lainnya¹⁹. Komunikasi kemudian berkembang tidak hanya pada ranah personal atau sosial tetapi sebagai bentuk interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam suatu negara. Transaksi informasi semacam ini menjadi suatu yang ideal bagi negara demokrasi dimana pemerintah dipilih

¹⁷ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*. New Jersey: Pearson Prentice Hall (1972)

¹⁸ Andries Hoogerwerf, *Overheidsbeleid*. Wolters Kluwer Nederland B.V. (2014)

¹⁹ James W. Carey, *Communication as culture : essays on media and society* (Rev. ed.). New York: Routledge (2009)

oleh rakyat dan harus bertanggung jawab terhadap rakyat. Oleh karena itu tarik ulur kepentingan kerap terjadi antara negara dan masyarakat sehingga dibutuhkan strategi penyampaian informasi dan pengambilan keputusan yang demokratis dengan melihat konteks dan kondisi masyarakat namun tetap efektif dan efisien untuk mencapai tujuan nasional.

f. Teori Motivasi

Menurut George Terry, motivasi merupakan sebuah dasar atau basis yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk dapat mencapai titik tertentu dalam hidupnya yang diwujudkan dengan cara melakukan peningkatan pada kemampuan dan kemauan.²⁰ Motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat orang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara motivasi yang mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku, seperti faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sumber motivasi yang menjadikan seseorang melakukan sesuatu terbagi menjadi 2 kelompok yakni :

1) Motivasi yang berasal dari luar (ekstrinsik)

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak terkait dengan dirinya.

2) Motivasi yang berasal dari dalam (intrinsik)

Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Itu sebabnya motivasi intrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan dari dalam diri.

²⁰ George Terry, Prinsip – Prinsip Manajemen, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996)

10. Data dan Fakta.

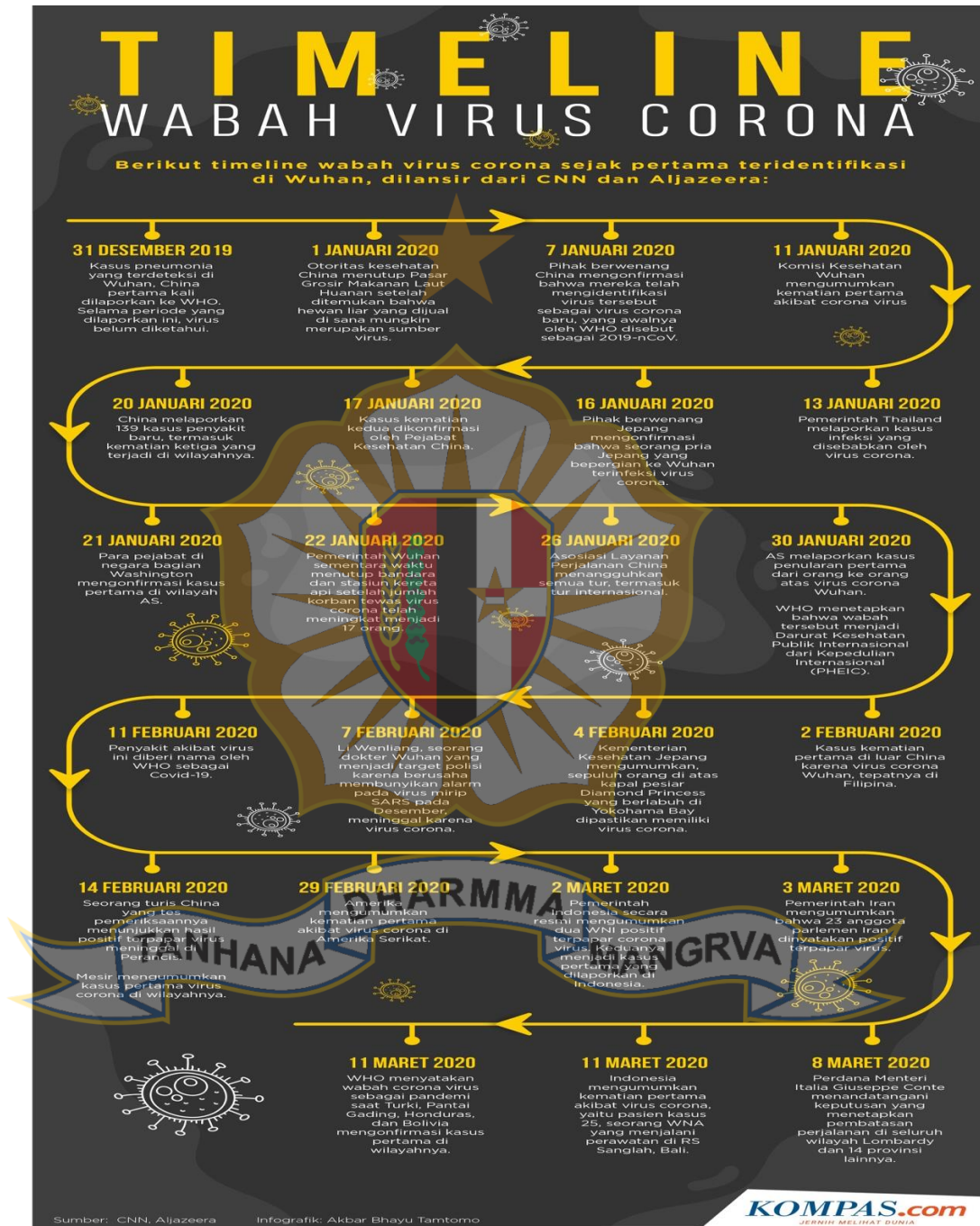
Beberapa penelitian sebelumnya mencatat bahwa sebelum Covid-19 menjadi pandemi global terdapat beberapa penyakit yang juga berubah menjadi pandemi karena dampaknya yang sangat besar dan terjadi di beberapa negara. Beberapa penyakit yang menjadi pandemi dunia diantaranya :



Global pandemi Covid-19 berdampak pada semua sektor kehidupan manusia. Covid-19 bermula pada laporan pertama wabah Covid-19 yang berasal dari kasus Pneumonia Wuhan, China, sejak akhir Desember 2019. Gejala dari pasien meliputi demam, batuk kering, dan dispnea yang di diagnosis sebagai gejala infeksi virus pneumonia. Awalnya, penyakit itu disebut Pneumonia Wuhan oleh pers karena gejala yang serupa pneumonia.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberi nama virus baru 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) pada 12 Januari 2020 dan kemudian secara resmi mengubahnya menjadi Covid-19 pada 12 Februari 2020. Dalam

perjalanannya WHO kemudian menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global sejak 11 Maret 2020 karena virus tersebut telah menginfeksi lebih dari 121.000 orang di Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika serta berada di lebih dari 118 negara.²¹



²¹ <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/11/104000165/hari-ini-dalam-sejarah--who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>.

11. Faktor-faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh.

Perkembangan lingkungan strategis mempengaruhi elaborasi mendalam dan kontekstual dari permasalahan penguatan bela negara pada era pandemi di Indonesia. Hal ini dikarenakan era pandemi melemahkan batas-batas antar negara yang sebelumnya ditandai dengan batas-batas fisik secara geografis. Di era pandemi dan perkembangan teknologi, interaksi antar masyarakat (*people-to-people*) menjadi bagian yang tidak terlepaskan dan dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan lingkungan strategis akan dielaborasi dalam tiga tingkatan analisis, yakni pengaruh global, regional dan pengaruh di tingkat nasional.

a. Pengaruh Global.

Keberadaan pandemi di Covid-19 sangat mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi pada tatanan global. Perubahan pertama yang dapat diamati adalah menurunnya kepercayaan komunitas global kepada institusi internasional yang bersifat sektoral, terutama terhadap *World Health Organization* (WHO). Pada bulan Juli 2020, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa perintah eksekutif untuk mundur dari WHO telah ditandatangani dan akan berlaku efektif mulai 2021. Presiden Trump melihat bahwa WHO bertanggung jawab atas keberadaan pandemi Covid-19 karena tidak melakukan *containment* saat virus tersebut masih berada dalam tingkat epidemi di Tiongkok.²²

Meskipun keputusan Trump tersebut telah ditahan oleh Presiden Joe Biden selaku Presiden yang baru terpilih, keputusan tersebut telah membuat negara-negara besar di dunia mulai meragukan WHO dan mengurangi kepercayaan terhadap WHO. Padahal, unsur kepercayaan merupakan salah satu unsur penting dalam penanganan pandemi dan

²² Dawn Kopecki dan Berkeley Lovelace Jr, "Trump Blames WHO For Getting Coronavirus Pandemic Wrong, Threatens to Withhold Funding" *CNBC*, 7 April 2020. Diakses melalui <https://www.cnbc.com/2020/04/07/trump-blames-who-for-getting-coronavirus-pandemic-wrong-threatens-to-withhold-funding.html> pada 1 April 2021

penyampaian informasi yang menyeluruh kepada seluruh masyarakat dunia.²³

Di tengah pandemi Covid-19, banyak negara di dunia pun mulai menutup diri dan mundur dari berbagai inisiatif multilateral yang ada. Padahal, situasi pandemi global justru seharusnya mendorong kemitraan global dalam pengadaan alat-alat kesehatan maupun pengadaan vaksin untuk membangun kekebalan kelompok (*herd immunity*). Pada akhirnya, WHO berhasil membentuk Aliansi Vaksin Global yang bertujuan untuk memberikan vaksin gratis dengan jumlah tertentu kepada negara-negara yang tidak mampu membeli vaksin dengan jumlah besar. Skema aliansi vaksin bertajuk Covax diprediksi akan menyediakan vaksin bagi dua puluh persen populasi setiap negara secara bertahap.²⁴

Keberadaan Aliansi Vaksin Global yang dibentuk oleh WHO, mendapat tentangan dari liga anti vaksin bahkan muncul beberapa gerakan di beberapa negara yang menentang keberadaan vaksin, yang kemudian dikenal sebagai kelompok anti vaksin. Kelompok ini alih-alih percaya keampuhan vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh, mereka justru percaya bahwa vaksin jadi ancaman baru untuk tubuh dengan berbagai penyakit baru yang ditimbulkan. Ketidakpercayaan terhadap vaksin ditemukan tumbuh subur di belahan Bumi bagian barat, seperti di beberapa wilayah Eropa dan Amerika Utara. Kebalikan dari itu, ketidakpercayaan terhadap vaksin justru ditemukan rendah atau bahkan tak terlihat di wilayah Asia dan Afrika

Seperti yang dilaporkan oleh AFP, liga anti vaksin menyebut bahwa zat seperti fenoksoetanol dan kalium klorida yang dipercaya ditemukan dalam vaksin merupakan racun berbahaya untuk tubuh. Selain itu, mereka juga berargumentasi bahwa pandemi Covid-19 adalah situasi yang sengaja dirancang oleh pemerintah. Salah satu pioneer gerakan anti vaksin di Amerika Serikat adalah dr. Joseph Mercola, dalam

²³ "Risk Communication" *World Health Organization*, April 2018. Diakses melalui <https://www.who.int/risk-communication/pmac-2018/en/> pada 1 April 2021

²⁴ Deti Mega Purnamasari, "Komitmen Bantu Kesetaraan Vaksin covid-19, Indonesia Pimpin Covax AMC" *Kompas*, 14 Januari 2021. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/14/09284451/komitmen-bantu-kesetaraan-vaksin-covid-19-indonesia-pimpin-covax-amc?page=all> pada 1 April 2021

beberapa berita dan artikel disebutkan bahwa vaksin tidak berfungsi. Selain itu, terdapat pernyataan retorik tentang keamanan vaksin. dr. Joseph Mercola menggunakan media sosial Facebook dan Twitter sebagai media dalam menyebarkan pendapatnya.

Selain keberadaan gerakan anti vaksin atau liga anti vaksin, gerakan sosial budaya yang timbul di era pandemi adalah gerakan anti *lockdown*. Salah satu yang terbesar adalah gerakan anti *lockdown* terjadi di Jerman. Pada tanggal 1 Agustus 2021 dilaporkan ribuan orang melakukan demonstrasi di Berlin menentang rencana parlemen Jerman yang akan melakukan *lockdown* akibat dari meningkatnya jumlah orang yang terinfeksi virus varian delta di Jerman.²⁵

b. Pengaruh Regional.

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang dekat dengan negara asal virus Covid-19 yang diduga berasal dari Tiongkok dan memiliki interaksi yang tinggi dengan negara tersebut. Oleh karena itu, ketika situasi pandemi diumumkan oleh WHO, maka negara-negara Asia Tenggara bergerak cepat dengan menutup perbatasannya dan mengumumkan berbagai kebijakan pembatasan sosial. Setelah gelombang pertama Covid-19 berhasil diatasi, ASEAN selaku organisasi regional mulai membahas mekanisme-mekanisme pemulihan situasi pandemi.

Beberapa mekanisme Asia Tenggara yang dirumuskan melalui ASEAN antara lain adalah *ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF)*, *Hanoi Plan of Action*, serta *ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework*. ACRF merupakan rencana komprehensif ASEAN dalam merancang pemulihan pasca-pandemi. Meskipun begitu, rencana ini memang terbatas hanya kepada pilar-pilar ekonomi seperti memaksimalkan potensi pasar intra-ASEAN, meningkatkan digitalisasi,

²⁵ <https://www.kompas.com/global/read/2021/08/02/065321870/unjuk-rasa-pecah-di-berlin-tolak-pembatasan-covid-19-600-orang-ditahan>

meningkatkan ketahanan keamanan insani (*human security*), serta memajukan upaya penciptaan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.²⁶

Sementara itu, *Hanoi Plan of Action* juga merupakan rencana pemulihan yang fokus di bidang ekonomi. Perbedaannya adalah, *Hanoi Plan of Action* berfokus pada menjamin keberlangsungan dan konektivitas *supply chain* di Asia Tenggara, terutama bagi barang-barang esensial di bidang medis maupun penunjang ketahanan pangan. Terakhir, *Travel Corridor Arrangement Framework* merupakan kerja sama yang dibahas di Pilar Politik-Keamanan yang bertujuan agar negara-negara Asia Tenggara tetap membuka perbatasannya dan tidak sepenuhnya berfokus pada urusan *inward-looking*. Kerja sama ini penting juga untuk memulihkan sektor pariwisata intra-ASEAN yang mengalami kemunduran yang cukup besar karena pandemi Covid-19.

Berbagai inisiatif tersebut dibutuhkan untuk segera menangani dampak pandemi Covid-19 yang telah dirasakan oleh berbagai pihak, terutama di sektor perekonomian. Berdasarkan survei *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia* (ERIA) dan *AmCham*, dampak pandemi sangat dirasakan oleh perusahaan di Asia Tenggara dimana 75 persen perusahaan mengalami penurunan yang signifikan pada produksi, pendapatan, dan/atau penjualannya. Anjloknya kinerja tersebut disebabkan oleh turunnya permintaan dan terganggunya rantai pasok akibat pembatasan sosial yang diberlakukan. Secara sektoral, sektor yang paling merugi adalah sektor produk olahan dan daging dengan 100 persen perusahaan melaporkan kerugian. Sektor berikutnya yang mendapatkan tekanan cukup besar adalah sektor elektronik dan pelayanan kesehatan. Akan tetapi, terdapat sektor yang melaporkan tren positif, yakni sektor perdagangan dan logistik dikarenakan meningkatnya volume belanja elektronik.²⁷

²⁶ "Pertemuan ASEAN Comprehensive Recovery Framework Dalam Menyusun Kerjasama Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19" *Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN Indonesia*, 14 Juli 2020. Diakses melalui <https://meaindonesia.ekon.go.id/pertemuan-asean-comprehensive-recovery-framework-dalam-menyusun-kerjasama-pemulihan-ekonomi-pasca-pandemik-covid-19/> pada 2 April 2021

²⁷ Yohana Artha Uly, "Dampak Pandemi, Kegiatan Bisnis di ASEAN Diproyeksi Pulih Kuartal II 2021" *Kompas*, 1 Desember 2020. Diakses melalui <https://money.kompas.com/>

Dampak pandemi juga dirasakan di tingkat masyarakatnya imbas kerugian perusahaan tersebut. Dalam laporan yang sama, 40 persen perusahaan di Asia Tenggara menahan perekrutan pekerjaan. Bahkan, 27 persen perusahaan merumahkan pegawainya tanpa kepastian. Angka tersebut tentu saja akan berkontribusi kepada meningkatnya angka pengangguran apabila tidak ditangani dengan cepat.

Meskipun pandemi Covid-19 terkesan menyebabkan kemunduran yang masif di Asia Tenggara, beberapa negara berhasil melakukan manajemen pandemi yang cukup optimal dan melakukan transisi ke *new normal*. Salah satunya adalah Vietnam. Pada masa awal terjadinya pandemi, Vietnam mampu meredam penyebaran kasus Covid-19 melalui intensifikasi pengawasan, meningkatkan pengujian laboratorium, memastikan pencegahan dan pengendalian infeksi, manajemen kasus di fasilitas kesehatan, pesan komunikasi risiko yang jelas, serta kolaborasi multi-sektoral yang koheren. Pembatasan yang dilakukan oleh Vietnam juga terarah dan diseimbangi dengan peningkatan kemampuan *testing, tracing, dan treatment*.²⁸ Akibatnya, transisi Vietnam ke *new normal* terbilang cepat dengan pemulihan sektor pariwisata yang secara konsisten meningkat melalui pembukaan tempat wisata untuk wisatawan domestik. Selain itu, Vietnam tetap menegakkan protokol kesehatan dan masyarakatnya bahkan melihat penggunaan masker sebagai bagian dari kehidupan mereka.²⁹

Akan tetapi, tidak semua negara di Asia Tenggara berhasil melakukan manajemen pandemi Covid-19, terutama dikarenakan tingkat kepatuhan masyarakat yang berbeda-beda selama pandemi. Salah satu contoh kasusnya adalah di Malaysia. Menteri Pertahanan Malaysia menyebut bahwa kepatuhan masyarakat pada *lockdown* pertama hanya

read/2020/12/01/113800726/dampak-pandemi-kegiatan-bisnis-di-asean-diproyeksi-mulai-pulih-kuartal-ii-2021?page=all pada 2 April 2021

²⁸ “Jurus Vietnam Tekan Pandemi Corona, Nol Kematian Pasien” *CNN Indonesia*, 24 Maret 2020. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200324162828-106-486559/jurus-vietnam-tekan-pandemi-corona-nol-kematian-pasien> pada 2 April 2021

²⁹ Jawahir Gustav Rizalm=, “Melihat Penerapan New Normal di Vietnam, Jerman, dan Selandia Baru” *Kompas*, 18 Mei 2020. Diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/18/113300665/melihat-penerapan-new-normal-di-vietnam-jerman-dan-selandia-baru?page=all> pada 2 April 2021

mencapai 60 persen. Padahal, Malaysia pada saat tersebut menyelenggarakan acara keagamaan yang dihadiri oleh lebih dari 16.000 peserta dan menyebabkan *cluster* kasus Covid-19 mencapai lebih dari 900 kasus. Dari 16.000 partisipan tersebut pun, 4.000 masih belum terlacak dan berpotensi berperan sebagai penyebar virus Covid-19 di Malaysia. Berdasarkan kondisi tersebut, Malaysia pun terpaksa untuk mengerahkan militer serta menutup akses-akses jalan untuk membatasi ruang mobilisasi masyarakatnya.

c. Pengaruh Gatra Nasional

Berdasarkan berbagai gatra-gatra Ketahanan Nasional (Astagatra), terdapat berbagai faktor yang dapat berkontribusi terhadap penguatan bela negara di era pandemi guna meningkatkan ketahanan nasional:

1) **Geografi.** Berdasarkan Data Baru Kewilayahan Indonesia yang dihasilkan oleh Badan Informasi Geospasial, luas total wilayah Indonesia yang meliputi daratan dan lautan mencapai 8.300.000 km² dengan jumlah pulau mencapai 17.504 pulau.³⁰ Namun di sisi lain, potensi geografis ini belum disadari sepenuhnya karena kurangnya kesadaran geografis yang dimiliki oleh segenap bangsa. Bahkan di tengah pandemi seperti saat ini, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan justru berpotensi membuka kerawanan penyebaran Covid-19 akibat masih kurang efektifnya kebijakan pembatasan mobilitas manusia.

2) **Demografi.** Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 mencapai 270,20 juta jiwa. Angka tersebut menunjukkan peningkatan 32,56 juta jiwa dibanding tahun 2010. Bagi aspek kependudukan, keberadaan pandemi Covid-19 berdampak negatif karena menghambat program KB yang berpotensi meningkatkan angka kelahiran.³¹ Selain itu,

³⁰ Hendry Roris Sianturi, "Ini Data Baru Kewilayahan Laut Indonesia" *Gatra*, 10 Agustus 2018. Diakses melalui <https://www.gatra.com/detail/news/337332-Ini-Data-Baru-Kewilayahan-Laut-Indonesia> pada 2 April 2021

³¹ Ahadian utama, "Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Program KB di Indonesia" *VOA Indonesia*, 8 Mei 2020. Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/dampak-pandemi-covid-19-bagi-program-kb-di-indonesia/5411570.html> pada 2 April 2021

pandemi Covid-19 juga dapat mempengaruhi bonus demografi yang rencananya akan tercapai di tahun 2045. Pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan oleh generasi muda saat ini juga dikhawatirkan menyebabkan *knowledge loss* yang akan berakibat pada keberadaan satu generasi yang tidak mendapatkan pengetahuan yang memadai.

3) Sumber Kekayaan Alam. Di era *new normal*, pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dihiraukan. Era *new normal* seharusnya dijadikan momentum untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai instrumen untuk memberikan manfaat berkelanjutan dari alam untuk pembangunan sosial ekonomi.³² Disamping itu, Indonesia juga harus memperhatikan pengelolaan SKA yang ada dengan berkelanjutan.

4) Ideologi. Pancasila merupakan ideologi bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus diperkuat dalam era *new normal* sebagai landasan bela negara. Seluruh nilai yang terkandung dalam Pancasila penting bagi pelaksanaan bela negara di era *new normal* untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang peduli dan tangguh di era *new normal*.

5) Politik. Secara politik, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibutuhkan dalam rangka percepatan manajemen pandemi dan pelaksanaan era *new normal*. Permasalahan sinergi ini adalah kondisi yang berbeda-beda di tiap daerah sehingga sulit untuk merumuskan satu solusi yang dapat berlaku di semua daerah. Namun dalam kenyataannya, masih ada ego-sektoral yang terlihat baik antara pusat dengan daerah terkait

³² Martha Herlinawati, "Peneliti: Siapkan Strategi Pengelolaan DAS di Masa Normal Baru" *Antara*, 24 Juni 2020. Diakses melalui <https://www.antaranews.com/berita/1572294/peneliti-siapkan-segera-strategi-pengelolaan-das-di-masa-normal-baru> pada 2 April 2021

kebijakan dan pengambilan keputusan dalam penanganan pandemi.

6) Ekonomi. Pandemi Covid-19 memberikan pukulan bagi sektor perekonomian. Berdasarkan data SMRC, tercatat 29 juta orang terkena PHK sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Dalam laporan lainnya, BPS menyebut bahwa PHK akibat pandemi menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan mencapai 2,7 juta jiwa. Hal ini berpotensi memperparah dampak resesi ekonomi seperti meningkatnya pengangguran, meningkatnya kesenjangan, hingga ancaman inflasi dan deflasi.³³

7) Sosial Budaya. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat di era *new normal*. Akan tetapi, kepatuhan masyarakat semakin lama semakin menurun. Hal tersebut disebabkan oleh desakralisasi protokol kesehatan, dimana protokol kesehatan saat ini hanya dipandang sebagai salah satu norma dalam kehidupan sosial bukan sebagai syarat utama dari kehidupan sosial.

8) Hankam. Peran institusi di bidang hankam dalam hal ini TNI dan Polri semakin dibutuhkan dalam mendukung penanganan pandemi, khususnya penegakan protokol kesehatan. Di sektor pertahanan, wabah pandemi Covid-19 semakin menegaskan bahwa potensi ancaman yang berasal dari aspek nir-militer dan biologis menjadi semakin nyata, sulit diprediksi dan dikendalikan. Sementara dari sektor keamanan, pandemi Covid-19 telah berdampak meluas ke berbagai sektor, termasuk meningkatnya kriminalitas akibat banyak masyarakat yang di-PHK, menganggur dan semakin terperosok ke dalam jurang kemiskinan

³³ Callistasia Wijaya, "Dampak Covid-19: 2,7 Juta Orang Masuk Kategori Miskin Selama Pandemi, Pemulihan Ekonomi Butuh Waktu Lama" *BBC*, 17 Februari 2021. Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55992498> pada 2 April 2021

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum.

Bab ini akan melanjutkan pembahasan dan elaborasi menggunakan kerangka analisis yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya. Kerangka analisis yang telah dijelaskan seperti data dan fakta, kerangka teori, peraturan perundang-undangan, hingga dinamika lingkungan strategis akan menjadi fondasi dalam membahas judul penguatan bela negara di era pandemi untuk memperkuat ketahanan nasional bangsa Indonesia.

Bela negara merupakan bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki warga negara yang memiliki rasa cinta terhadap negara yang kuat, sehingga mereka akan berjuang untuk membela negaranya. Bela negara di era pandemi menjadi semakin penting karena peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia setiap hari semakin bertambah, tercatat sesuai laporan situs *Worldmeter* pada tanggal 15 Juli 2021 terjadi penambahan kasus baru sebanyak 56.757 kasus positif Covid-19.³⁴

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali yang diberlakukan sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 sebagai sebuah terobosan untuk mencegah peningkatan laju jumlah kasus positif Covid-19. Meskipun demikian, berbagai terobosan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan efektif manakala masyarakat mampu mengaplikasikannya. Hal ini yang kemudian menjadikan bela negara di era pandemi semakin penting karena kontribusi aktif masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan dan mematuhi anjuran pemerintah menjadi syarat utama percepatan penanganan pandemi. Tanpa kepatuhan dan kontribusi masyarakat, maka pandemi akan semakin tidak terkendali sehingga Indonesia akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan negara lain untuk kembali ke dalam kehidupan normal.

³⁴ <https://www.worldometers.info/coronavirus/> yang diakses pada tanggal 15 Juli 2021 pukul 18.00 WIB

Namun masyarakat sendiri belum memahami inti dari sikap dan perilaku bela negara itu sendiri. Masyarakat Indonesia masih terjebak dalam pengertian bahwa bela negara bersifat militeristik dengan tujuan untuk mempertahankan negara dari ancaman serangan militer dari negara asing. Padahal, sikap dan perilaku bela negara perlu diperdalam bukan dari karakter militeristiknya, melainkan dari upaya-upaya untuk memperkuat rasa nasionalisme dan semangat patriotisme untuk menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap bangsa Indonesia. Patriotisme dan nasionalisme pun tidak hanya terbatas membela negara dalam situasi perang, melainkan juga mendukung tenaga kesehatan dan pemerintah dalam penanganan pandemi melalui kepatuhan terhadap protokol kesehatan hingga membatasi mobilitas dengan tidak mudik ke kampung halaman di saat hari raya.

Terdapat beberapa potensi konsekuensi dari lemahnya pelaksanaan bela negara di era pandemi. Lemahnya rasa patriotisme dan nasionalisme menyebabkan masyarakat, khususnya generasi muda, makin apatis terhadap kondisi bangsa yang sedang terdampak oleh pandemi. Ketidakpedulian masyarakat akan menyebabkan penanganan pandemi semakin berlarut-larut sehingga mengancam keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terganggunya ketiga hal tersebut menyebabkan ketahanan Indonesia semakin rawan untuk menghadapi potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan kontemporer. Oleh karena itu, bela negara di era pandemi menjadi komponen penting untuk memperkuat ketahanan nasional.

13. Urgensi Bela Negara di Era Pandemi.

a. Karakteristik dan Dampak Pandemi Covid-19.

Kantor *World Health Organisation* yang berada di China atau *WHO China Country Office* melaporkan adanya kasus pneumonia yang tidak dikenali etiologinya pada 31 Desember 2019 di kota Wuhan. Baru seminggu setelahnya, otoritas berwenang di China mengidentifikasi penyakit tersebut berasal dari *coronavirus* jenis baru (*novel coronavirus*). Penyebarannya yang tidak terkendali di Kota Wuhan membuat kluster pneumonia di kota tersebut yang akhirnya tanpa pembatasan yang ketat

terjadilah penyebaran *novel coronavirus* tersebut ke seluruh dunia pada Januari 2020. WHO kemudian mendeklarasikan SARS Cov-2 atau 2019 *novel coronavirus* tersebut sebagai Pandemi pada 11 Maret 2020 setelah sebelumnya pada 30 Januari 2020 telah dideklarasikan *Public Health Emergency of International Concern*.

Dapat dibiliang bahwa Covid-19 diakibatkan oleh virus yang sama dengan SARS yang yaitu dengan menyerang saluran pernafasan manusia. Menurut Unit Gugus Tugas Covid-19 Kementerian Dalam Negeri, meskipun Covid-19 memiliki angka kematian yang lebih kecil dari SARS yaitu 5 persen berbanding 9,6 persen, tetapi penyebaran Covid-19 jauh lebih masif atau *transmittable* sehingga akumulasi angka kematian dan penularan juga cukup besar.

Karakteristik Covid-19 pada dasarnya serupa dengan SARS yaitu menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga sesak nafas yang mengakibatkan kadar oksigen di dalam tubuh manusia berkurang drastis karena paru-paru tidak dapat menangkap oksigen. Masa inkubasi dari SARS Cov-2 adalah 1 hingga 14 hari dan umumnya akan timbul gejala pada hari ketiga hingga ketujuh yang ditandai dengan flu, bersin, hidung tersumbat, pilek, hingga demam dan batuk keras. Dengan masa inkubasi yang relatif lama dan diikuti dengan gejala seperti bersin dan batuk, SARS Cov-2 menjadi salah satu virus dengan penyebaran yang paling masif melalui udara atau disebut *airborne*.

Dengan kenyataan ini, dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 sangatlah besar dan luas tidak hanya di aspek kesehatan tetapi juga menjadi efek domino bagi aspek-aspek lain mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Faktor utama yang menyebabkan parahnya dampak Covid-19 adalah tingkat penyebarannya sehingga perlu dihadapi dengan pembatasan sosial dan interaksi antara manusia demi memutus rantai penyebaran. Mulanya, negara-negara di dunia tidak siap menghadapi kondisi pandemi yang menyebar antarmanusia dengan sangat cepat sehingga banyak negara

yang kewalahan di masa awal Pandemi Covid-19. Tidak terkecuali Indonesia.

Pernyataan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di awal terjadinya pandemi dengan meremehkan Covid-19 tidak akan menjangkiti Indonesia cukup membuat seluruh elemen negara tidak siap ketika terjadi kasus infeksi pertama sehingga penularan secara nasional akhirnya tak terhindarkan³⁵. Akibatnya, ketakutan publik yang tidak terkendali membuat ekonomi sepanjang tahun 2020 menjadi lesu akibat kebijakan pembatasan yang masih belum matang yang diperparah dengan pelaku ekonomi besar yang melakukan penimbunan peralatan kesehatan, mengurangi upah pekerjaannya hingga memberhentikan mereka, dan menahan-nahan pengeluaran sehingga roda ekonomi tidak berputar. Akibatnya catatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 minus di kisaran 2,9 persen hingga 0,9 persen

b. **Esensi Bela Negara dan Faktor yang Mempengaruhi.**

Esensi dan pemahaman dari bela negara itu sendiri perlu dipahami secara mendalam. Hal ini juga terkait dengan pemahaman masyarakat yang masih berlawanan dengan esensi dari bela negara itu sendiri. Pemahaman mengenai esensi bela negara juga penting untuk membantu meningkatkan dukungan masyarakat Indonesia terhadap konsep yang seringkali salah diinterpretasikan tersebut.

Tinjauan pertama dari bela negara mengacu kepada kerangka peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa

³⁵ Pernyataan Kontroversial Menkes Terawan di Awal Pandemi Covid 19, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16290701/pernyataan-kontroversial-menkes-terawan-di-awal-pandemi-covid-19?page=all> pada 22 Agustus 2021

Indonesia dari berbagai Ancaman.³⁶ Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam bela negara yang dibina melalui lingkup pendidikan, lingkup masyarakat, serta pekerjaan warga negara Indonesia.

Bela negara merupakan komponen penting bagi wajib militer, tetapi bela negara tidak dapat disamakan dengan wajib militer. Bela negara merupakan tuntutan negara bagi warga negaranya agar memiliki rasa kebanggaan atau rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air sehingga harus siap membela dan berkorban. Sementara itu, wajib militer merupakan upaya negara dalam memberikan dasar-dasar pertahanan sipil dalam keadaan darurat, misalnya situasi perang.³⁷ Dengan demikian, sikap dan perilaku bela negara bisa dan memang seharusnya berlaku dalam situasi non darurat. Bela negara harus menjadi komponen penting yang melekat dalam setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali.

Berbekal pengertian tersebut, bela negara di era pandemi pun bisa diartikan tanpa harus memiliki interpretasi militeristik dalam pelaksanaannya. Menurut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, bela negara pun dapat diwujudkan oleh semua profesi dari pengabdian kehidupan masing-masing. Pengabdian tenaga kesehatan untuk berusaha semaksimal mungkin menyelamatkan nyawa juga menjadi perwujudan bela negara di era pandemi. Tidak hanya tenaga kesehatan, profesi lain seperti guru, petani, hingga polisi yang tetap berusaha dan bekerja semaksimal mungkin walaupun menghadapi tantangan dari pandemi juga menjadi wujud bela negara melalui pengabdian profesi. Sebagai masyarakat umum, bela negara juga dapat dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan penanganan pandemi Pemerintah. Dengan mematuhi protokol kesehatan, masyarakat dapat mengurangi beban kerja tenaga kesehatan dan aparat pemerintahan lainnya untuk mempercepat penanganan pandemi.

³⁶ UU No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, pasal 11 ayat 1

³⁷ Gunarta, "Haruskah Komponen Cadangan Sumber Daya Manusia Berimplikasi Pada Wajib Militer?" *Jurnal Perencanaan Pembangunan* 16, No.1 (2010): hal 69

Berdasarkan tinjauan historis, bela negara memang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang berorientasi militeristik. Secara global, wajib militer pertama kali dipraktekkan dalam fenomena Revolusi Perancis pada tahun 1879. Pada peristiwa tersebut, Napoleon Bonaparte bersama pasukannya melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan kaum bangsawan dengan membawa semboyan kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Situasi menjadi rumit karena para bangsawan di Perancis meminta dukungan dari kekaisaran-kekaisaran di luar Perancis untuk melemahkan posisi pemberontakan.³⁸

Dikarenakan jumlah pemberontak yang terbatas, Napoleon melalui kecakapan dan kecerdasannya membentuk rasa kebangsaan rakyat Perancis sehingga mereka secara sukarela membentuk pasukan-pasukan perlawanan di berbagai kota dalam perjuangan revolusionernya. Dengan semangat kebangsaan yang memuncak, Napoleon tidak hanya berhasil menjalankan Revolusi Perancis, tetapi juga melakukan perluasan wilayah hingga Rusia Timur. Uniknya, walaupun ditujukan untuk memperkuat pasukan militer, pemberontakan rakyat Perancis juga dilakukan dalam bidang-bidang kehidupan lainnya, terutama bidang ekonomi.³⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa semangat kebangsaan yang besar tidak hanya berpengaruh terhadap kekuatan negara dalam bidang militer, melainkan juga bidang-bidang kehidupan lainnya.

Sementara itu, peristiwa yang memicu adanya bela negara di Indonesia terkait dengan upaya rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang terancam direbut kembali oleh Belanda. Pada Desember 1948, tentara Belanda melakukan agresi menuju wilayah Yogyakarta, yang pada saat itu adalah ibukota Republik Indonesia. Menjelang kejatuhan Yogyakarta, Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kemakmuran Sjafrudin Prawiranegara untuk mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatera

³⁸ Beni Sukardis (editor) et al, *Pertahanan Semesta dan Wajib Militer: Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*, Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 75

³⁹ Sri Indriyani Umra, "Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme atau Militerisasi Warga Negara" *Lex Renaissance* 4, No.1 (2019): hal 169

Barat. PDRI dibentuk sebagai bentuk eksistensi Indonesia yang diduduki kembali oleh Belanda. Idanya adalah untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya terbatas pada tokoh-tokoh di Yogyakarta, melainkan juga wilayah lainnya yang sangat luas dan beragam.

Pendirian PDRI merupakan upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara di tengah serbuan Belanda. Upaya tersebut merupakan nilai dasar dari bela negara yang mencakup cinta tanah air, sadar akan bangsa dan negara, rela berkorban demi bangsa, dan bersedia untuk membela negara dalam kondisi apapun. PDRI juga ditandai sebagai momentum dimana para pejuang dan pahlawan yang terlibat dalam kemerdekaan Republik Indonesia mempertaruhkan nyawa demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggal pendirian PDRI di Bukittinggi tanggal 19 Desember 1948 ini pun ditetapkan sebagai Hari Bela Negara yang terus diperingati hingga saat ini.

Pada era Orde Baru, bela negara cenderung dilakukan melalui proses doktrinasi kepada masyarakat umum. Masyarakat umum diberikan informasi-informasi yang bermuatan nilai nasionalisme, seperti pendidikan militeristik di Kampus hingga pendalaman nilai P4. Permasalahan dari bela negara yang dilakukan oleh rezim Orde Baru adalah berpotensi untuk menyelewengkan nilai nasionalisme menjadi nilai yang memiliki interpretasi subjektif dari penguasa. Program bela negara pada Orde Baru pun dinilai sebagai upaya untuk meredam gejolak perlawanan di masyarakat, membungkam partisipasi publik, dan menjadi eksploitasi atas diri masyarakat Indonesia. Pelaksanaan bela negara pada masa Orde Baru pun kurang menangkap esensi dari bela negara itu sendiri. Bela negara seharusnya adalah upaya-upaya untuk membangkitkan semangat kebangsaan dalam rangka melindungi keutuhan NKRI, bukan untuk melanggengkan kekuasaan penguasa. Oleh karena itu, program ini pun dikritik oleh banyak negarawan hingga pengamat.

Di era Reformasi, bela negara pun sempat vakum akibat sensitivitas pelaksanaan program tersebut di era Orde Baru. Meskipun

begitu, Pemerintah tetap merumuskan definisi bela negara seperti yang telah tercantum dalam UU PSDN. Dari segi program, program bela negara di era Reformasi disebut Program Kesadaran Bela Negara (PKBN). PKBN merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang diselenggarakan dalam tiga lingkup, yakni pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan. Berbeda dengan yang sebelumnya, PKBN difokuskan pada diseminasi dan penyebaran nilai-nilai nasionalisme melalui kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan sukarela serta bersifat interaktif. Beberapa wujud sosialisasi dan diseminasi dalam PKBN antara lain melalui seminar, lokakarya, penyuluhan, diskusi interaktif, dan lainnya.⁴⁰

Dengan program-program tersebut, maka bela negara di era Reformasi tidak sepenuhnya dapat diinterpretasikan sebagai kegiatan yang berorientasi militeristik. Kegiatan ini juga menyasar berbagai unsur masyarakat mulai dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga masyarakat umum. Dengan dilaksanakan melalui tiga sektor tersebut, PKBN diharapkan dapat menjangkau sebanyak mungkin masyarakat tanpa harus melabeli kegiatan tersebut sebagai kegiatan wajib.

Dalam proses bela negara, terdapat beberapa unsur karakteristik nilai-nilai kebangsaan yang berusaha ditanamkan kepada masyarakat. Nilai-nilai tersebut antara lain cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Bela negara dilakukan untuk memenuhi berbagai tujuan, antara lain: mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara.

Untuk menilai kesuksesan dari program bela negara, maka perlu dipahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan program bela negara. Pengukuran untuk menilai kesuksesan program

⁴⁰ Fitria Chusna Farisa, "Jokowi Teken PP, Pembinaan Bela Negara Dilakukan di Lingkup Pendidikan hingga Pekerjaan" *Kompas*, 20 Januari 2021. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/20/14381591/jokowi-teken-pp-pembinaan-bela-negara-dilakukan-di-lingkup-pendidikan-hingga?page=all> pada 17 Mei 2021

bela negara lebih mudah dilihat dari lingkup pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan bela negara dilakukan secara reguler, jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Dalam lingkup pendidikan sendiri, kesuksesan program bela negara bergantung pada pemahaman peserta didik, peranan tenaga pendidik, serta peranan kelompok sosial informal. Pemahaman peserta didik menjadi penting sebagai fondasi awal mengenai pengetahuan bela negara yang dimiliki. Sementara itu, peranan tenaga pendidik menjadi krusial tidak hanya sebagai pemberi materi bela negara, tetapi juga sebagai contoh yang dapat diikuti oleh peserta didik sebagai teladan. Terakhir, kelompok sosial informal seperti lingkungan keluarga dan kelompok pertemanan akan mempengaruhi keberlanjutan perilaku bela negara yang telah dipupuk melalui pendidikan. Apabila ketiga pihak tersebut dapat berfungsi dengan optimal, maka program bela negara akan memiliki dampak yang komprehensif bagi masyarakat, khususnya generasi penerus bangsa Indonesia.

Bela negara penting untuk diterapkan dalam masa pandemi. Pandemi merupakan tantangan global yang tidak hanya menyerang bidang kesehatan, namun dampaknya juga dirasakan dalam berbagai sektor lainnya mulai dari sektor ekonomi, transportasi, hingga pangan. Oleh karena itu, tidak salah apabila pandemi dapat dikategorikan sebagai situasi darurat yang perlu dihadapi oleh bangsa Indonesia.

c. **Era Pandemi: Tantangan dan Hambatannya.**

Pandemi Covid-19 memberikan tantangan yang berat bagi seluruh negara di abad ke-21 ini. Tantangan utama dari Covid-19 terutama berasal dari aspek kesehatan. Indonesia yang pada saat itu tidak siap menghadapi pandemi dan penyebarannya cukup kewalahan dengan jumlah kasus yang terus meningkat tetapi tidak didukung fasilitas kesehatan mulai dari ruang isolasi mandiri yang dapat diakses masyarakat hingga peralatan seperti masker dan obat-obatan yang belum tertangani. Bahkan setelah setahun pandemi berlangsung, Indonesia sempat kewalahan kembali setelah kasus infeksi melonjak

tajam sebesar 112 persen pasca Hari Raya Idul Fitri 2021. Hal ini berimbas hingga sekarang dimana terjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat diterapkan secara penuh dan masih bertahap dilonggarkan.

Dapat dilihat bahwa tantangan terbesar dari Pandemi Covid-19 adalah sifatnya yang fluktuatif yaitu seolah-olah telah terkendali tetapi ketika ada kelengahan sedikit maka akan dengan mudah membuat suatu krisis kesehatan secara langsung. Hal ini sangat wajar karena SARS Cov-2 merupakan jenis virus yang dapat bermutasi dalam jangka waktu singkat dengan menyesuaikan kondisi kesehatan manusia itu sendiri. Misalnya, beberapa varian yang dikenal lebih cepat menyebar adalah varian Delta atau B.1.617.2 hingga varian Lambda. Virus-virus tersebut mulanya mengalami mutasi yang terjadi secara lokal di wilayah tertentu seperti di Inggris maupun India, tetapi dengan penyebarannya yang cepat maka negara lain juga tidak bias menghindari varian-varian baru tersebut. Varian baru tersebut dikarakteristikan lebih cepat menyebar karena mampu mengikatkan diri pada protein manusia lebih efektif. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu hambatan penanganan Covid-19 hingga sekarang.

Di samping itu terdapat juga tantangan dan hambatan dalam penyelesaian Pandemi Covid-19 di antaranya berkaitan dengan lemahnya kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, maraknya beredar berita *hoax* yang menimbulkan kekhawatiran dan penolakan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, hingga semakin pesimisnya masyarakat terhadap keadaan dan kondisi kehidupan mereka dan dunia akibat Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan sehingga terjadi beragam masalah lainnya mulai dari kesehatan mental, kriminalitas dan lain sebagainya.

d. **Pandemi Covid-19 Sebagai Ancaman Keselamatan dan Keamanan Negara.**

Sektor yang terdampak oleh Pandemi Covid-19 bukan hanya kesehatan tetapi juga ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik yang pada

akhirnya akan mengancam keselamatan dan keamanan negara. Meskipun aspek kesehatan menjadi faktor yang krusial dalam memicu krisis nasional tetapi walaupun lonjakan kasus telah menurun, kebijakan pembatasan yang dilakukan pemerintah juga dapat berdampak serius terhadap penurunan kualitas sektor lainnya. Misalnya saja pendidikan. Dengan pembatasan yang terus-menerus dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) maka kualitas pendidikan dapat menurun karena keterbatasan para murid dalam ketersediaan akses internet dan teknologi maupun permasalahan sosial lainnya yang timbul akibat tekanan belajar dari rumah. Dampaknya adalah generasi selanjutnya dari Indonesia bisa kehilangan potensi maksimalnya dan akibatnya *human development index* dan daya saing Indonesia dapat menurun.

Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan publik dari pemerintah yang efektif dalam menghadapi berbagai masalah sekaligus dengan tidak mengorbankan aspek kesehatan. Pada dasarnya kebijakan PPKM yang sedang dilangsungkan dengan kelonggaran untuk beroperasinya aktivitas ekonomi adalah cara yang efektif untuk menyeimbangkannya dengan aspek kesehatan. Alhasil, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal-II 2021 menyentuh angka positif 7,07 persen secara tahunan atau *year on year*. Dapat dilihat bahwa bahu-membahu antara pemerintah dengan masyarakat menjadi kunci bagi pemulihan pandemi. Oleh karena itu diperlukan *total defence* atau Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta dari setiap elemen negara yang dalam hal ini partisipasi Bela Negara dari pihak masyarakat juga

14. Implementasi Bela Negara di Era Pandemi.

a. Kebijakan Pemerintah Dalam Memutus Rantai Penyebaran Covid-19.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bela negara di era pandemi justru semakin relevan mengingat situasi darurat yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan elaborasi mengenai bentuk-bentuk bela negara yang telah dilakukan oleh

Pemerintah hingga yang dilakukan oleh berbagai sektor untuk mendukung percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Pemerintah sendiri telah merumuskan berbagai kebijakan mulai Kebijakan 3T (*testing, tracing, dan treatment*), himbuan protokol kesehatan berdasarkan 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas), hingga melakukan *containment* terhadap penyebaran virus Covid-19. Kebijakan 3T kini telah lebih efektif dengan tersedianya layanan *swab test* di puskesmas dengan menunjukkan KTP yang bersangkutan termasuk terobosan terbaru pemerintah terutama Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan 11 platform fasilitas konsultasi kesehatan atau *telemedicine* untuk menyediakan obat-obatan yang diperlukan bagi pasien Covid-19 bergejala ringan ketika melakukan isolasi mandiri.⁴¹

Kebijakan lainnya yaitu pembatasan sosial berwujud kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. PSBB merupakan bentuk karantina wilayah yang bersifat ketat melalui pembatasan berbagai kegiatan, seperti meliburkan sekolah dan tempat kerja non-esensial, menghentikan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, pembatasan kegiatan sosial-budaya, hingga pembatasan moda transportasi. Jangka waktu dari PSBB adalah selama masa inkubasi empat belas hari, dengan persetujuan Kementerian Kesehatan. Dampak dari kegiatan PSBB sendiri cukup besar karena menghentikan hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat kecuali sektor-sektor esensial pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kebijakan PSBB pun berkembang menjadi kebijakan PSBB transisi atau disebut PSBB proporsional dimana beberapa larangan tersebut pun dikurangi dan beberapa aktivitas masyarakat mulai diperbolehkan. Dikarenakan perbedaan kebijakan diantara pemerintah daerah, pemerintah pusat pun turun tangan dan memutuskan untuk membentuk

⁴¹ Alur Mendapatkan Layanan Telemedicine bagi Pasien Isolasi Mandiri, diakses dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/berita-utama/20210707/5338052/alur-mendapatkan-layanan-telemedicine-bagi-pasien-isolasi-mandiri/> pada 28 Agustus 2021

kebijakan PPKM mikro. Pelaksanaan kebijakan PPKM terdiri dari beberapa poin, seperti membatasi perkantoran dengan menerapkan kerja dari rumah (*work from home*) sebesar 75 persen, kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*), sektor esensial beroperasi 100 persen, kegiatan ibadah beroperasi 50 persen, dan kegiatan sektor ekonomi non-esensial dapat berjalan 25-50 persen dengan pembatasan protokol kesehatan yang ketat.

Kebijakan-kebijakan tersebut pun membawa dampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya di sektor tertentu. PSBB dinyatakan berhasil untuk menekan jumlah kasus, tetapi dampak ekonominya cukup besar. Sementara itu, di masa PPKM mikro ada lonjakan-lonjakan kasus yang terjadi karena libur panjang, tetapi secara umum jumlah kasus Covid-19 dapat terkendali serta kegiatan ekonomi masyarakat dapat berjalan.⁴²

Hal ini berkat strategi pemerintah dalam mengkomunikasikan kebijakannya yang cenderung tegas tetapi tetap memperhatikan segi humanis sesuai dengan kondisi psikologis publik yang masih khawatir akibat lonjakan kasus terbaru. Seperti yang disebut oleh James W. Corey bahwa komunikasi melibatkan dua pihak. Dalam hal ini pemerintah tidaklah bertindak otoriter dengan melakukan pembatasan total dan melarang masyarakat melakukan aktivitas ekonomi, tetapi pemerintah mempertimbangkan aspirasi masyarakat agar setiap aktivitas ekonomi bisa berjalan namun dengan protokol kesehatan sehingga perputaran ekonomi masih berlangsung meskipun ruang gerak dan kerumunan masyarakat ditertibkan. Misalnya dengan mengizinkan usaha rumah makan dan pusat perbelanjaan untuk tetap beroperasi tetapi harus dilakukan dengan pembelian *online* atau dengan dibawa pulang.

⁴² Rakhmat Nur Hakim, "PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB" *Kompas*, 25 Januari 2021. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/25/21290111/ppkm-dinilai-tak-berhasil-pemerintah-diminta-kembali-terapkan-psbb?page=all> pada 17 Mei 2021

b. Partisipasi Masyarakat.

Berdasarkan teori partisipasi oleh Sundaningrum, partisipasi masyarakat dalam konteks Pandemi Covid-19 dilakukan dalam dua kategori yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi tidak langsung masyarakat berupa kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah dalam membatasi gerak dan mobilitas masyarakat melalui PSBB dan PPKM. Dengan berdiam diri di rumah dan melakukan pertemuan melalui media virtual alih-alih berkumpul di kafe atau kedai kopi, masyarakat telah berpartisipasi secara tidak langsung untuk mengurangi tingkat penularan Covid-19.

Sedangkan partisipasi langsung bersifat lebih menonjol dan dapat langsung dirasakan dampaknya misalnya dengan membagikan informasi penting terkait ketersediaan peralatan kesehatan, obat-obatan, tata cara isolasi mandiri maupun meminta rujukan ke IGD RS maupun partisipasi tingkat lanjutan dengan menjadi relawan kesehatan, relawan supir ambulans, relawan pemakaman jenazah hingga memberikan sumbangan finansial yang terkoordinir bagi pasien yang mengalami infeksi Covid-19. Masyarakat memang cenderung aktif di masa sekarang bahkan turut terlibat sebagai anggota Satgas Covid-19 di tingkat RT, RW, dan Kelurahan sehingga setiap masyarakat di lingkungan tersebut tidak terlantar jika mengalami Covid-19.

c. Potret Bela Negara Masyarakat menghadapi Pandemi Covid-19.

Potret bela negara di era pandemi dapat terlihat dari beberapa kontribusinya di berbagai bidang. **Pertama**, di bidang kesehatan. Sejak krisis kesehatan publik yang melanda Indonesia pada tahun 2020, tenaga kesehatan menjadi pekerjaan yang paling berisiko di Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah tenaga kesehatan seringkali juga tidak mampu untuk mengimbangi jumlah pasien Covid-19 maupun orang-orang yang harus diawasi akibat gejala Covid-19. Kemudian, tenaga kesehatan juga menjadi garis terdepan yang seringkali harus mengorbankan hidupnya di tengah upaya untuk melakukan manajemen terhadap pandemi Covid-19.

Untuk membantu para tenaga kesehatan, mahasiswa fakultas kedokteran dari berbagai universitas di Indonesia pun dilibatkan untuk membantu tenaga kesehatan dalam mendorong penanggulangan Covid-19. Dikarenakan belum memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan/keputusan medis, mahasiswa fakultas kedokteran dapat membantu untuk memeriksa fisik dan pemantauan kualitas kesehatan pasien. *Screening* awal kesehatan pasien sangat penting dalam penanganan pandemi untuk membantu para dokter mengidentifikasi penyakit komorbid yang mungkin dimiliki oleh pasien serta membantu tindakan-tindakan krusial yang mungkin harus diambil dengan segera.

Generasi muda tidak hanya membantu penanggulangan kesehatan fisik, melainkan juga permasalahan yang terkait dengan kesehatan mental. Penghentian proses sosialisasi secara tiba-tiba dan berlangsung tanpa batas waktu yang jelas menyebabkan kesehatan mental masyarakat Indonesia menjadi terganggu, terutama generasi muda.

Para generasi muda dapat berkontribusi untuk memulihkan kesehatan mental masyarakat Indonesia dengan menjadi *peer counselor* sebagai teman atau sahabat dari sesamanya maupun dengan memberantas *hoax* dan berita-berita negatif penanganan pandemi. Berita negatif dapat menguras kesehatan mental masyarakat yang hidupnya sudah dipersulit karena kehadiran pandemi Covid-19. Oleh karena itu, generasi muda dapat meningkatkan penyampaian pesan-pesan positif yang dapat memotivasi masyarakat untuk tetap berusaha yang terbaik di masa pandemi.

Generasi muda merupakan generasi yang lebih memiliki paparan terhadap teknologi informasi yang tinggi dibanding generasi pendahulunya, sehingga generasi muda diharapkan dapat membantu inovasi atau sekedar memberikan dukungan kepada program pemerintah dalam penanganan pandemi. Tidak hanya itu, generasi muda juga dapat melakukan bela negara yang lebih optimal mengingat risiko kemunculan gejala dan kematian pada generasi muda akibat Covid-19 terbilang lebih rendah dibanding generasi sebelumnya. Oleh

karena itu, bela negara sebagai bentuk pengabdian seharusnya bisa dilakukan lebih maksimal oleh para generasi muda.

Kedua, dalam bidang riset dan teknologi. Pandemi Covid-19 membawa dorongan yang besar untuk mendorong proses digitalisasi. Hal ini dikarenakan setiap interaksi fisik berisiko untuk menyebarkan virus Covid-19. Oleh karena itu, bidang riset dan teknologi berperan penting untuk mewujudkan digitalisasi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat di tengah era pandemi.

Beberapa inovasi pun sangat bermanfaat untuk penanganan kesehatan selama pandemi. Diantaranya adalah GeNose. GeNose adalah alat *screening* virus Covid-19 melalui hembusan nafas yang dianalisis melalui *artificial intelligence* untuk mempercepat deteksi dini Covid-19. GeNose pun telah digunakan di berbagai stasiun, bandara, dan terminal di Indonesia. GeNose menjadi alternatif *screening* Covid-19 yang lebih cepat, lebih mudah diakses, dan lebih murah jika dibandingkan dengan tes *swab* PCR dan *swab* antigen.⁴³

Inovasi lainnya adalah *medical robot assistant* (robot pembantu) bernama Raisa. Robot Raisa adalah asisten rumah sakit yang dapat membantu penanganan Covid-19. Tugas yang dilakukan Robot Raisa antara lain mengantarkan makanan, minuman, obat, barang pribadi milik pasien, serta memungkinkan komunikasi dua arah antara pasien dan tenaga medis. Kehadiran Robot Raisa penting untuk mengurangi interaksi yang berisiko antara tenaga kesehatan dengan pasien di rumah sakit.

Terakhir, inovasi yang digunakan oleh Satgas penanganan Covid-19 adalah aplikasi bernama Sistem Bersatu Lawan Covid-19 (BLC). Aplikasi ini menghasilkan data *real time*, terintegrasi, sistematis, dengan melibatkan koordinasi antar dan lintas sektor. Dengan inovasi BLC, diharapkan ada sentralisasi data Covid-19 yang dimiliki oleh Pemerintah

⁴³ Ellyvon Pranita, „Setahun Covid-19 Indonesia Ini Inovasi Karya Anak Bangsa Lawan Pandemi Corona” *Kompas*, 3 Maret 2021. Diakses melalui <https://www.kompas.com/sains/read/2021/03/03/080100223/setahun-covid-19-indonesia-ini-inovasi-karya-anak-bangsa-lawan-pandemi?page=all> pada 18 Mei 2021

sehingga koordinasi lintas sektor semakin mudah dilakukan selama pandemi.

Ketiga, bidang pendidikan. Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang paling terdampak pandemi Covid-19. Pelaksanaan pendidikan terpaksa berubah menjadi daring karena pembatasan sosial yang berlaku. Transisi tersebut pun tidak mudah mengingat baik para guru maupun para siswa belum terbiasa dengan pelaksanaan belajar mengajar secara daring. Oleh karena itu, peran generasi muda pun diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan pendidikan di era pandemi. Beberapa hal pun telah dilakukan oleh generasi muda, seperti pendirian dan optimalisasi *platform* belajar *online* hingga berperan menjadi guru di komunitas lokal mereka. Kedua hal tersebut mungkin dilakukan mengingat penguasaan teknologi generasi muda yang baik memungkinkan keterlibatan mereka dalam pendidikan di era pandemi.⁴⁴

Keempat, adalah bidang seni, budaya, dan olahraga. Sebelum adanya pandemi, keterlibatan generasi muda sangat besar dalam bidang-bidang tersebut. Sayangnya, kehadiran pandemi menghambat ketiga bidang tersebut untuk beroperasi sehingga generasi muda terpaksa untuk menghentikan aktivitas mereka. Padahal, keterlibatan mereka dalam ketiga bidang tersebut penting untuk diwujudkan sebagai pengembangan diri sekaligus mendorong prestasi dan kebanggaan bangsa di dunia internasional. Oleh karena itu, keterlibatan generasi muda perlu dimulai kembali di era pandemi.

Beberapa hal sebenarnya sudah dilakukan dalam bidang tersebut, walaupun menghadapi tantangan yang tidak mudah. Dalam bidang seni-budaya, pertunjukan wayang di Taman Mini pun sudah beralih ke pertunjukan daring untuk menghindari kerumunan yang dapat memicu penyebaran. Sementara dalam bidang olahraga, tim nasional dalam olahraga sepakbola dan bulutangkis tetap bersiap menghadapi pertandingan-pertandingan internasional walaupun terdapat berbagai

⁴⁴ Deti Mega Purnamasari, "Pemerintah Dorong Generasi Muda Jadi Guru" *Kompas*, 2 Februari 2021. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/02/14395021/pemerintah-dorong-generasi-muda-jadi-guru> pada 18 Mei 2021

tantangan operasional. Berbagai tantangan pandemi memang tidak mudah, tetapi generasi muda harus terus bergerak dalam bidang-bidang tersebut.

Penjelasan-penjelasan yang telah dirangkai sebelumnya sejalan dengan kerangka analisis yang disampaikan dalam Tinjauan Pustaka. Berbagai upaya bela negara yang dilakukan oleh berbagai sektor sejalan dengan kerangka teori Partisipasi Masyarakat. Fasli Djalal dan Dedi Supriadi menyatakan bahwa partisipasi berarti kelompok masyarakat terlibat untuk mengenal masalah mereka sendiri, membuat keputusan secara adil, serta aktif dalam pencarian solusi pemecahan masalah. Partisipasi masyarakat sangat jelas terlihat dalam peran generasi muda untuk membantu pemecahan dampak pandemi di berbagai bidang kehidupan. Generasi muda berperan aktif dalam mengatasi dampak pandemi di bidang kesehatan hingga sosial-budaya dan itu menunjukkan bahwa generasi muda memiliki partisipasi aktif dalam bela negara di era pandemi.

Bela negara tersebut tidak hanya dilakukan oleh unsur masyarakat saja, melainkan juga pemerintah. Di era pandemi, Pemerintah telah menyusun peraturan perundang-undangan yang terkait seperti Perpres No. 82 tahun 2020 tentang KPC-PEN. Setiap kebijakan Pemerintah pun diarahkan untuk manajemen pandemi dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan menjaga kelangsungan hidup NKRI. Kebijakan Pemerintah pun diharapkan mampu mengendalikan virus agar tidak terjadi lonjakan seperti yang ada di negara tetangga Asia Tenggara, seperti yang sudah disampaikan dalam dinamika lingkungan strategis di tingkat global.

Salah satu upaya yang masih berlangsung tersebut adalah program vaksinasi yang menjadi salah satu wujud kebijakan bela negara di era pandemi. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang dapat merangsang pembentukan imunitas sistem imun di dalam tubuh. Vaksinasi merupakan upaya pencegahan primer yang diharapkan akan membentuk kekebalan yang optimal.

Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh serta menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial ekonomi masyarakat. Dengan vaksinasi kepada masyarakat, diharapkan kekebalan komunitas dapat terbentuk. Kekebalan komunitas adalah kondisi dimana sebagian besar masyarakat memiliki imunitas terhadap Covid-19, sehingga angka infeksi Covid-19 dapat diredam. Jikapun ada infeksi, maka diharapkan tidak menimbulkan gejala yang berat atau menyebabkan kematian.

d. Penguatan Bela Negara menghadapi Era Pandemi.

Situasi darurat perlu ditangani melalui upaya-upaya luar biasa. Upaya-upaya tersebut tidak bisa hanya mengandalkan Pemerintah saja, melainkan butuh partisipasi aktif dari setiap unsur masyarakat. Penanganan pandemi bukanlah sebatas kebijakan karantina kesehatan, melainkan juga membutuhkan kepatuhan dan rasa empati masyarakat untuk membantu percepatan penanganan pandemi. Oleh karena itu, bela negara di era pandemi justru semakin penting untuk mendorong percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Apabila bela negara di era pandemi kurang dianggap relevan oleh masyarakat, maka percepatan penanganan pandemi akan terganggu. Bukan tidak mungkin Indonesia akan terus menghadapi gelombang-gelombang kasus Covid-19 yang disebabkan oleh rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan Covid-19 serta rendahnya empati terhadap tenaga kesehatan dan pihak-pihak yang terdampak pandemi ini. Oleh karena itu, bela negara era pandemi sudah seharusnya diperkuat peranannya.

Salah satu wujud bela negara yang secara sederhana dapat diperkuat dan dilakukan oleh semua lapisan masyarakat terlepas dari keahlian dan kemampuannya adalah dengan mengikuti program vaksinasi. Hingga 17 Mei 2021, Indonesia telah memvaksinasi setidaknya 9.066.982 orang untuk vaksinasi dosis kedua dan 13.803.055 orang untuk vaksinasi dosis pertama. Masyarakat yang sudah divaksinasi berasal dari tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia.

Pemerintah juga mengharapkan partisipasi badan usaha melalui vaksinasi gotong royong, yakni vaksinasi yang dilakukan oleh pihak swasta. Sayangnya, vaksinasi gotong royong hingga saat ini masih terhambat karena jumlah vaksin yang dimiliki oleh Indonesia masih rendah.

Untuk mempercepat laju vaksinasi, pemerintah juga telah membangun diplomasi baik secara bilateral maupun multilateral untuk meningkatkan pasokan vaksin. Salah satu skema multilateral yang diterima oleh Indonesia secara bertahap adalah skema Covax. Kemudian, Indonesia juga secara mandiri tengah berusaha untuk memproduksi sendiri vaksin dalam negeri, dengan tajuk vaksin Merah Putih. Vaksin tersebut diharapkan mampu mewujudkan kemandirian vaksin di tengah masa pandemi. Sayangnya, vaksin Merah Putih belum akan mampu diproduksi hingga akhir 2021.

Meskipun begitu, ketiga kebijakan tersebut tidak akan berhasil tanpa partisipasi masyarakat yang pro-aktif untuk mendukung kebijakan tersebut. Kebijakan pembatasan sosial sekuat dan selama apapun tidak akan berdampak apabila masyarakat terus melakukan pelanggaran protokol kesehatan dan tidak membatasi mobilitasnya. Kemudian, pemulihan ekonomi nasional tidak akan berhasil apabila masyarakat berlebihan dalam menahan konsumsinya serta menyalahgunakan bantuan-bantuan dan stimulus ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah. Terakhir, kebijakan vaksinasi dan upaya untuk membentuk *herd immunity* tidak akan berdampak apabila masyarakat tidak mau divaksin dan tidak menjaga protokol kesehatan walaupun sudah divaksin. Ketiga elaborasi tersebut sejatinya menunjukkan bahwa suatu kebijakan tanpa partisipasi masyarakat tidak akan berdampak secara komprehensif.

15. Implikasi penguatan bela negara di era pandemi terhadap Ketahanan Nasional.

a. Kondisi Ketahanan Nasional.

Tersebarnya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah memberikan pengaruh pada kondisi keamanan dan ketertiban

masyarakat di Indonesia dan ketahanan nasional. Hal ini sudah ditanggapi oleh *World Health Organization* (WHO) dengan menetapkan status pandemi global pada Covid-19 mengingat dampak negatif yang menyerang banyak negara di dunia. Wabah penyakit yang menerpa Indonesia ini menjadi bentuk ancaman nyata bagi keselamatan bangsa. Sebagai salah satu ancaman nir-militer, wabah ini termasuk salah satu hal yang mengganggu kondisi ketahanan nasional.

Indonesia adalah negara yang selalu waspada terhadap ancaman terhadap Ketahanan Nasionalnya. Pasalnya Indonesia secara geografis berada wilayah yang strategis sekaligus rawan terhadap pecahnya konflik antara dunia Barat di sebelah Timur dan Selatan Indonesia serta dunia Timur Tengah dan Asia di sebelah Timur dan Utara Indonesia. Oleh karena itu penguasaan ruang dan strategi geopolitik adalah hal yang mutlak diperlukan Indonesia untuk menjaga ketahanan nasionalnya sekaligus menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan bukan hanya secara militeristik tetapi juga politik dan diplomasi. Namun di tengah globalisasi dan isu politik internasional yang semakin tidak mengenal sekat-sekat batas negara, Indonesia turut mengalami ancaman serius terhadap ketahanan nasionalnya.

Setelah sebelumnya di awal abad ke-21 dunia memasuki babak baru dalam perlawanan terhadap jaringan terorisme transnasional, sekarang, permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia dan negara-negara di dunia adalah Pandemi Covid-19. Pandemi tentu membuat Ketahanan Nasional Indonesia menghadapi risiko yang besar karena sektor yang diserang adalah kesehatan dan ekonomi sekaligus. Sedangkan kedua sektor ini relatif tidak bisa berjalan dengan maksimal beriringan sehingga memerlukan adanya kebijakan yang mampu menyeimbangkan dua kepentingan ini yang didukung oleh partisipasi bela negara dari masyarakat.

Masyarakat adalah komponen penting dalam suatu negara untuk menghadapi ancaman ketahanan nasional berupa Pandemi Covid-19. Masyarakat dibutuhkan sebagai penjaga gatra nasional pada bidang sosial budaya dan kesehatan. Seperti yang disampaikan oleh Gubernur

Lemhannas Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo, Pandemi Covid-19 tidak bisa diprediksi kapan selesainya sehingga masyarakat perlu belajar hidup berdampingan dengan menjadikan protokol kesehatan sebagai syarat untuk berkehidupan sosial bukan sekadar alternatif norma yang dapat dilakukan.

b. Penguatan Bela Negara sebagai Konsepsi Ketahanan Nasional.

Sejatinya, Ketahanan Nasional adalah suatu konsepsi pembangunan nasional demi mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Dengan kata lain, terancamnya ketahanan nasional akan berakibat pada tidak tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa. Sebagai konsep yang dapat dijadikan pisau analisis bagi setiap permasalahan bangsa, Ketahanan Nasional berkaitan dengan delapan aspek kehidupan nasional (Astagatra) yang terdiri dari tiga aspek alamiah yang statis (tri gatra) dan lima aspek kehidupan yang dinamis (panca gatra). Ketahanan Nasional kemudian erat kaitannya dengan upaya dari setiap elemen negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Upaya inilah yang disebut sebagai bela negara.

Bela negara adalah wujud dari kecintaan terhadap tanah air serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya bela negara, maka konsepsi Ketahanan Nasional adalah hal yang sia-sia karena negara tidak memiliki aspek yang paling penting yaitu masyarakat untuk mencapai tujuan dan kepentingannya. Untuk itu diperlukan diperhatikan penguatan bela negara di era pandemi ini agar ketahanan nasional Indonesia tidak terancam.

Upaya yang dapat dilakukan pertama dengan membumikan sehingga lebih mudah dipahami dan diaplikasikan di tengah masa pandemi. Seperti yang telah disebutkan dalam UU No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, pembinaan bela negara dilakukan melalui lingkup pendidikan, pekerjaan, dan masyarakat. Program bela negara juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, hingga masyarakat umum.

Akan tetapi, metode pendidikan bela negara harus meninggalkan cara pandang tradisional yang masih bersifat militeristik dan terfragmentasi dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Hal ini menjadi penyebab dari sedikitnya masyarakat yang berminat untuk mengikuti program pendidikan bela negara sehingga berdampak pada aplikasinya yang juga semakin minim.

Padahal, merujuk pada Konsep Bela Negara, upaya pembelaan negara harus dilandasi kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia. Kecintaan tersebut merupakan konsep membumi yang tidak dapat dipaksakan oleh siapapun, bahkan Pemerintah. Pengadaan program pendidikan bela negara yang militeristik dan mengandalkan keteraturan melalui paksaan pun tidak akan menimbulkan kecintaan terhadap tanah air.

Bela negara akan menjadi senjata untuk mempertahankan nilai-nilai jati diri bangsa dari nilai-nilai asing yang dapat mengganggu ketahanan nasional. Di era keterbukaan informasi dan globalisasi, nilai-nilai dan budaya asing dapat diterima oleh bangsa Indonesia tanpa batasan yang jelas. Sayangnya, nilai-nilai tersebut seringkali tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia sehingga nilai-nilai kebangsaan tergerus oleh nilai asing tersebut. Lebih lanjut lagi, masyarakat Indonesia juga belum mampu menyaring nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai kebangsaan Indonesia.

Nilai-nilai tersebut antara lain liberalisme dan radikalisme. Liberalisme mengedepankan prinsip kompetisi yang terbuka dan bebas sehingga berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila yang mendukung adanya kolektivisme dan kerja sama.⁴⁵ Sementara itu, radikalisme bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila karena mengedepankan kekerasan dan ajaran yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan peri kemanusiaan yang beradab.⁴⁶ Dengan demikian, apabila kedua nilai

⁴⁵ Kiki Syahnakri, "Pancasila Versus Liberalisme" *Kompas*, 23 April 2012. Diakses melalui <https://tekno.kompas.com/read/2012/04/23/02092868/Pancasila.Versus.Liberalisme?page=all> pada 19 Mei 2021

⁴⁶ Desilia Rahmadani, "Radikalisme Tidak Sesuai Dengan Nilai-Nilai Pancasila" *Universitas Widya Mandala Surabaya*. Diakses melalui <https://osf.io/wa6yb/download/?format=pdf> pada 19 Mei 2021

tersebut tidak mampu dibendung di era keterbukaan informasi, maka masyarakat Indonesia khususnya generasi muda akan semakin tidak mengenal nilai-nilai kebangsaan yang menjadi fondasi bagi bela negara.

Kondisi ini bertentangan dengan kondisi ideal konsep Bela Negara yang diutarakan oleh H. Kaelan dan Achmad Zubaidi. Mereka menyebutkan bahwa bela negara perlu dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air, kesadaran hidup berbangsa dan bernegara, serta keyakinan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan akan mengurangi keyakinan masyarakat Indonesia terhadap Pancasila dan UUD 1945. Berkurangnya keyakinan akan menyebabkan lemahnya kecintaan terhadap tanah air sehingga program bela negara pun sulit diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, Pemerintah perlu membendung dampak dari nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai kebangsaan dengan memperkuat penyaringan terhadap konten-konten yang tidak sesuai dengan nilai kebangsaan.

Permasalahan lainnya adalah masih adanya resistensi dari sebagian kalangan terkait penerapan bela negara dari kalangan masyarakat sipil yang terdiri dari Imparsial, KontraS, Elsam, LBH, Lesperssi, HRWG, Setara Institute, dan ITM. Menurut lembaga-lembaga tersebut, pendidikan bela negara erat kaitannya dengan pendidikan pertahanan yang bersifat militeristik. Mereka juga berpendapat bahwa nasionalisme yang ditanamkan seharusnya bukan wewenang dari Kementerian Pertahanan, melainkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini dikarenakan bela negara tidak semata-mata hanya dikaitkan dengan pertahanan semesta, tetapi perlu dipahami bela negara bentuk lainnya, seperti pengabdian profesi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat umum.⁴⁷

⁴⁷ "LSM Tolak Bela Negara, Curiga Bentuk Lain Wajib Militer" *Jawa Pos*, 14 Oktober 2015. Diakses melalui <https://www.jawapos.com/nasional/hankam/14/10/2015/lsm-tolak-bela-negara-curiga-bentuk-lain-wajib-militer/> pada 19 Mei 2021

Resistensi tersebut menunjukkan setidaknya dua kekurangan dari program bela negara. Pertama, program bela negara belum dipahami oleh sepenuhnya oleh masyarakat. Bela negara seharusnya adalah penanaman nilai-nilai kebangsaan yang dilandasi kecintaan tanah air dan kesadaran berbangsa bernegara. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2019, pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa pembinaan bela negara diselenggarakan di lingkup pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan. Oleh karena itu, karakter militeristik seharusnya tidak dominan dalam pembinaan bela negara.

Hal ini menunjukkan bahwa program bela negara belum dijalankan dengan semestinya. Program ini sebenarnya sudah diajukan semenjak periode pertama Presiden Joko Widodo dan bahkan sudah dilaksanakan di bawah komando Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Sayangnya, karakter militeristik ini masih kuat dan justru malah memperkuat resistensi masyarakat terhadap program bela negara yang dijalankan oleh Pemerintah. Bahkan, terdapat satu ASN yang meninggal dunia akibat kelelahan mengikuti program bela negara.

Regulasi untuk penerapan dan penguatan bela negara harus dikaji. Program bela negara telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan negara. UU tersebut menyebutkan bela negara merupakan hak dan kewajiban warga negara Indonesia dan dilaksanakan melalui lingkup pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait.

Sayangnya, operasionalisasi dari UU tersebut belum sepenuhnya jelas sehingga mengganggu pelaksanaan sehari-hari program bela negara. Kembali lagi, kajian ini menemukan bahwa pelatihan-pelatihan yang dilakukan masih berdasar kepada latihan-latihan militeristik. Padahal, berdasarkan konsep Bela Negara yang diutarakan oleh Budi Soesilo Soepanji, terdapat dua sifat bela negara yakni sifat lunak (psikologis dan fisik) serta sifat keras (berkontribusi melawan ancaman militer). Pelatihan-pelatihan militeristik hanya berkontribusi terhadap sifat keras dari bela negara itu sendiri, bukan sifat lunak.

Hal ini juga terlihat dari beberapa program bela negara yang telah berjalan. Salah satunya adalah kasus dimana organisasi FPI di daerah Banten menjalani pelatihan bela negara. Kegagalan dari program bela negara untuk menumbuhkan sifat lunak terlihat dari fakta bahwa FPI menjalankan pemikiran-pemikiran radikalisme sehingga ditetapkan menjadi organisasi terlarang. Tidak hanya itu, beberapa anggota yang mengikuti program bela negara justru dituduh juga terlibat dalam baiat ISIS yang dipimpin oleh mantan sekretaris umum FPI.⁴⁸

Oleh karena itu, operasionalisasi program bela negara yang telah dirumuskan dalam UU No.23 tahun 2019 perlu diperjelas. Aturan yang sudah diperjelas tersebut juga perlu melibatkan organisasi masyarakat sipil hingga tokoh masyarakat untuk menentukan bentuk bela negara yang diperlukan oleh suatu kelompok. Program bela negara pun diharapkan mampu untuk membina sifat lunak maupun sifat keras dalam warga negara Indonesia.

c. Implikasi Terhadap Ketahanan Nasional.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat terlihat bahwa bela negara di era pandemi merupakan bentuk kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat Indonesia dan juga sebagai bentuk konsepsi ketahanan nasional. Kemampuan bela negara yang kuat akan dapat memaksimalkan seluruh potensi elemen bangsa sehingga lebih cepat pulih dari krisis pasca pandemi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai wujud bela negara baik oleh unsur pemerintah maupun segenap warga negara. Wujud bela negara pemerintah dapat dilihat dari dikeluarkannya kebijakan-kebijakan ataupun program penanganan yang matang, efektif dan terukur guna mengatasi pandemi. Sementara itu wujud bela negara dari warga negara dapat dilihat dari kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan penanganan yang dikeluarkan ataupun tindakan-tindakan

⁴⁸ Darussalam J.S, "Ramai Soal Baiat ISIS, FPI Banten Pernah Gelar Latihan Bela Negara dan Sebar 1.000 Merah Putih hingga Perwira TNI Jadi Korban" *Banten Hits*, 28 April 2021. Diakses melalui <https://bantenhits.com/2021/04/28/ramai-soal-baiat-isis-fpi-banten-pernah-gelar-latihan-bela-negara-dan-sebar-1-000-merah-putih-hingga-perwira-tni-jadi-korban/> pada 19 Mei 2021

proaktif masyarakat dalam menghasilkan beragam inovasi guna lebih cepat keluar dari jerat pandemi.

Bela negara sebagai wujud konsepsi ketahanan nasional adalah strategi untuk menciptakan suatu kondisi ketahanan nasional di tengah ancaman Pandemi Covid-19. Bela negara berjasa dalam membantu percepatan penanganan pandemi yang dipimpin oleh Pemerintah. Dalam konteks pandemi ini, negara tidak bisa bertahan jika hanya pemerintah saja yang bergerak untuk menanggulangi krisis kesehatan. Negara membutuhkan partisipasi dan upaya bela negara dari masyarakat dalam bentuk kepatuhan terhadap protokol kesehatan, perlawanan terhadap berita *hoax*, pembatasan mobilitas, dan lain sebagainya.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, justru upaya bela negara dari masyarakat yang lebih banyak berkontribusi terhadap terkendalinya Pandemi Covid-19. Kerja keras dari tenaga kesehatan, Satgas Penanggulangan Covid-19, para aparatur kepolisian dan TNI menjadi kunci bagi upaya bela negara dari masyarakat. Contoh yang diberikan oleh pahlawan kesehatan tersebut mendorong masyarakat untuk turut aktif melakukan bela negara dengan mempedulikan lingkungannya, berbagi kebutuhan sehari-hari, saling membantu dalam memberi informasi soal kesehatan, dan lain sebagainya. Jika dorongan untuk melakukan bela negara ini terus dijaga maka permasalahan Covid-19 di Indonesia akan dapat membaik sehingga ketahanan nasional dapat tetap terjaga.

Pun demikian, dibutuhkan keteladanan dari para elit pimpinan dalam penerapan bela negara di era pandemi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bela negara adalah dengan memberikan. Contoh yang dapat diberikan adalah keterpaduan kebijakan antar lembaga dan antar pemerintahan, atau yang sering disebut sebagai egosektoral. Sebagai pemimpin, kepemimpinannya harusnya menjadi teladan dalam penanganan pandemi Covid-19. Para pemimpin tidak seharusnya saling berebut pengaruh dalam penanganan pandemi Covid-19.

Penanganan pandemi Covid-19 seharusnya berpegang kepada kepemimpinan lokal. Kepemimpinan lokal tidak bisa diartikan sebagai pemberian wewenang sepenuhnya kepada kepala daerah di berbagai tingkatan. Kepemimpinan lokal seharusnya diartikan sebagai kepemimpinan yang mendorong semua pemangku kepentingan, memaksimalkan solidaritas, serta menyesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah.⁴⁹ Dengan demikian, penanganan pandemi diharapkan tidak terfragmentasi dan mampu dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu.

Rendahnya implementasi bela negara akan membuat pandemi berlangsung lebih lama. Sehingga mau tidak mau kebijakan pembatasan mobilitas akan berlangsung lebih lama. Hal tersebut tentunya memberi dampak yang tidak baik terhadap pola hubungan sosial di masyarakat sebab interaksi sosial yang sangat terbatas. Untuk itu, berdasarkan teori komunikasi, diperlukan strategi komunikasi yang efektif dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan, agar masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut dapat memiliki kesadaran akan kepatuhan terhadap aturan tersebut. Nilai-nilai sosial dan budaya perlahan akan mulai tergerus dan tergantikan dengan nilai-nilai dari hal yang setiap hari mereka akses.

Salah satu contohnya adalah kebijakan pelarangan mudik yang diberlakukan pada hari raya lebaran tahun 2021. Pemerintah Pusat memutuskan untuk melarang segala jenis mudik, baik mudik jarak jauh maupun mudik lokal di wilayah aglomerasi. Tetapi dalam kenyataannya, masih ada kepala daerah yang memperbolehkan mudik lokal di wilayah aglomerasi. Kebijakan yang berbeda tersebut rawan untuk menimbulkan kebingungan di masyarakat serta membuat penanganan pandemi menjadi berlarut-larut.⁵⁰ Lebih lanjut lagi, hal ini memberikan preseden buruk bahwa bela negara di era pandemi yang dilakukan oleh para pemimpin negara tidak serius

⁴⁹ Dadan M. Ramdan, "Iluni UI: Ego Sektoral Menghambat Penanganan Covid-19" *Kontan* 7 Agustus 2020. Diakses melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/iluni-ui-ego-sektoral-menghambat-penanganan-covid-19> pada 19 Mei 2021

⁵⁰ Dimas Ryandi, "Legislator Bingung, Masih Ada Kepala Daerah Izinkan Warganya Mudik" *Jawa Pos*, 23 April 2021. Diakses melalui <https://www.jawapos.com/nasional/politik/23/04/2021/legislator-bingung-masih-ada-kepala-daerah-izinkan-warganya-mudik/> pada 19 Mei 2021

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan.

Dalam pembahasan pada bab sebelumnya, dapat terlihat bahwa peran bela negara perlu dikuatkan di masa pandemi. Bela negara merupakan bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam era pandemi, bela negara semakin penting untuk mewujudkan kontribusi aktif masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan dan mematuhi anjuran serta kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi. Pembahasan mengenai bela negara di era pandemi pun dapat dibagi menjadi beberapa bagian.

Pertama, Apa Urgensi Bela Negara di Era Pandemi. Dalam proses bela negara, terdapat beberapa unsur karakteristik nilai-nilai kebangsaan yang berusaha ditanamkan kepada masyarakat. Nilai-nilai tersebut antara lain cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Bela negara penting untuk diterapkan dalam masa pandemi. Pandemi merupakan tantangan global yang menyerang bidang kesehatan, dan berbagai sektor lainnya seperti sektor ekonomi, transportasi, hingga pangan. Apabila bela negara di era pandemi kurang dianggap relevan oleh masyarakat, maka percepatan penanganan pandemi akan terganggu.

Kedua, implementasi bela negara di era pandemi. Pemerintah telah merumuskan kebijakan penanganan pandemi seperti kebijakan *Testing, Tracing* dan *Treatment*, penerapan Protokol Kesehatan (3M), dan Pembatasan mobilitas (PSBB, PPKM, Larangan mudik, dll) serta pembatasan kegiatan masyarakat. Meskipun demikian, berbagai kebijakan tersebut harus diikuti oleh partisipasi masyarakat. Namun, fakta di lapangan memperlihatkan bahwa masih terdapat perilaku komponen bangsa mulai dari dari elit pemimpin/penyelenggara negara hingga masyarakat yang belum patuh dalam melaksanakan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

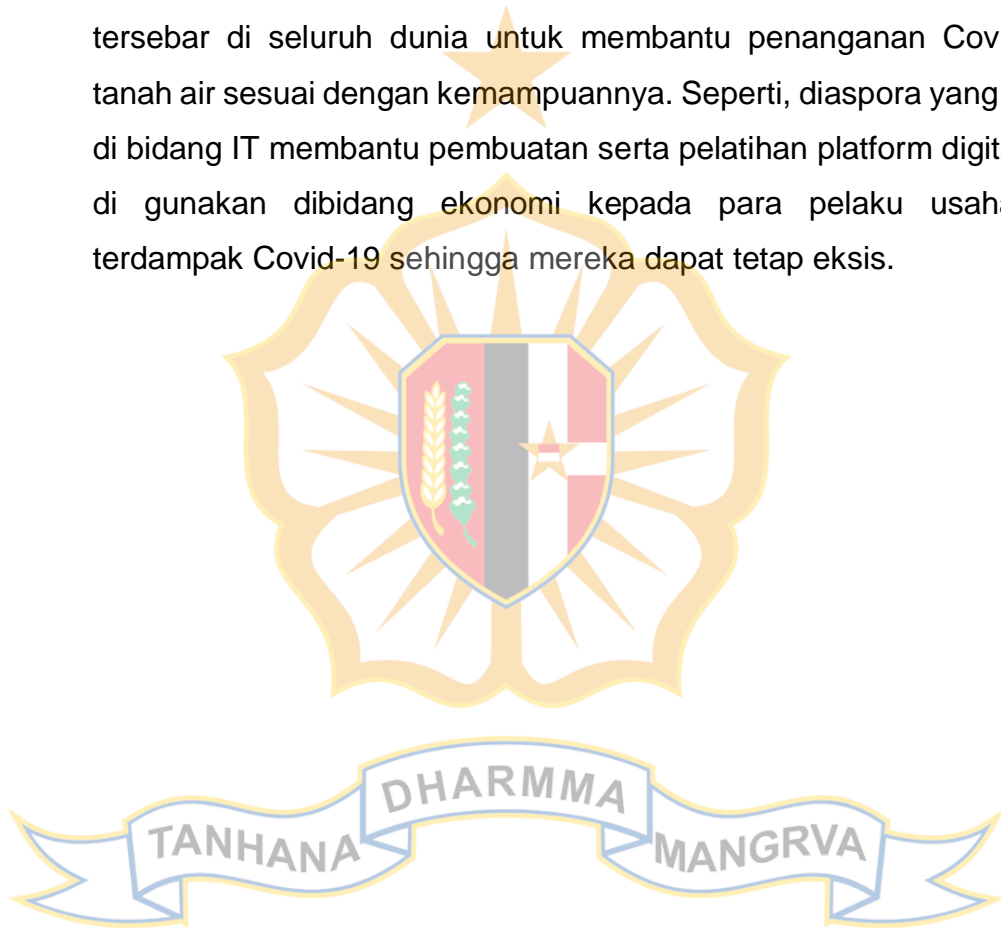
Ketiga, Bagaimana implikasinya penguatan bela negara di era pandemi terhadap Ketahanan Nasional. Kemampuan bela negara yang kuat akan dapat memaksimalkan seluruh potensi elemen bangsa sehingga lebih cepat pulih dari krisis pasca pandemi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai wujud bela negara baik oleh unsur pemerintah maupun segenap warga negara. Wujud bela negara pemerintah dapat dilihat dari dikeluarkannya kebijakan-kebijakan ataupun program penanganan yang matang, efektif dan terukur guna mengatasi pandemi. Sementara itu wujud bela negara dari warga negara dapat dilihat dari kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan penanganan yang dikeluarkan ataupun tindakan-tindakan proaktif masyarakat dalam menghasilkan beragam inovasi guna lebih cepat keluar dari jerat pandemi. Sebaliknya implementasi bela negara yang lemah, apalagi di situasi pandemi akan memukul berbagai gatra yang akhirnya akan berujung pada lemahnya ketahanan nasional.

Oleh karena itu, dibutuhkan solusi untuk menangani berbagai tantangan dan ancaman yang telah dibahas dalam sub-bab sebelumnya. Pemerintah harus mampu merangkul seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi merumuskan solusi. Dengan demikian masyarakat yang sejatinya lebih mengenal masalah mereka sendiri, dapat mengkaji pilihan-pilihan solusi dan membuat keputusan secara adil. Kemudian, keteladanan para elit juga dibutuhkan.

17. Rekomendasi.

- 1) Kementerian Pertahanan dan Pemerintah Daerah perlu melakukan terobosan dengan memberdayakan para kader Bela Negara yang selesai dilatih untuk menjadi vaksinator dan sukarelawan yang membantu percepatan pencapaian target vaksinasi nasional.
- 2) Kemendikbud-Ristek dan Kemenkes perlu mengoptimalkan keberadaan para dokter Coass dan tenaga kesehatan yang menunggu proses uji kompetensi, untuk diberdayakan dalam mendukung penanganan pandemi Covid-19 di berbagai rumah sakit darurat dan fasilitas kesehatan lainnya.

- 3) Kemenkominfo perlu menggandeng para *influencer* muda untuk mengedukasi masyarakat pada berbagai segmen, agar tidak mudah terjebak oleh berita hoaks serta agar dapat selalu berkontribusi dan mendukung program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.
- 4) BNPB bekerjasama dengan penggiat sosial melakukan mitigasi dan penanganan bencana Covid-19 di daerah terdampak yang selama ini belum tersentuh oleh aparat pemerintah.
- 5) Kemlu memberdayakan keberadaan diaspora-diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh dunia untuk membantu penanganan Covid-19 di tanah air sesuai dengan kemampuannya. Seperti, diaspora yang mampu di bidang IT membantu pembuatan serta pelatihan platform digital untuk di gunakan dibidang ekonomi kepada para pelaku usaha yang terdampak Covid-19 sehingga mereka dapat tetap eksis.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Beni Sukardis (editor) et al, *Pertahanan Semesta dan Wajib Militer: Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*, Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 75.
- Sri Indriyani Umra, "Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme atau Militerisasi Warga Negara" *Lex Renaissance* 4, No.1 (2019): hal 169.
- Gunarta, "Haruskah Komponen Cadangan Sumber Daya Manusia Berimplikasi Pada Wajib Militer?" *Jurnal Perencanaan Pembangunan* 16, No.1 (2010): hal 69.
- Tim Pokja. *Geostrategi dan Ketahanan Nasional*. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2021.
- Suwarno Widodo, "Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme" *Jurnal Ilmiah CIVIS* 1, Vol.1 (2011).
- Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Kurniawan (2005).
- Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pendidikan*. Yogyakarta: Perpustakaan Pelajaran (2011).
- Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*. New Jersey: Pearson Prentice Hall (1972).
- Andries Hoogerwerf, *Overheidsbeleid*. Wolters Kluwer Nederland B.V. (2014).
- James W. Carey, *Communication as culture: essays on media and society* (Rev. ed.). New York: Routledge (2009)
- George Terry, *Prinsip – Prinsip Manajemen*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996)
- A. M., Dumar, *Swine Flu: What You Need to Know*. Wildside Press LLC (2009)
- "Bela Negara Dalam Perspektif Strategi dan Kebijakan Pertahanan Negara" *WIRA*, Edisi Khusus 2017.
- Udin S. Winata Putra, *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Universitas Terbuka (2005): 18.

Peraturan Perundang-undangan :

UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Internet :

Darussalam J.S, “Ramai Soal Baiat ISIS, FPI Banten Pernah Gelar Latihan Bela Negara dan Sebar 1.000 Merah Putih hingga Perwira TNI Jadi Korban” *Banten Hits*, 28 April 2021. Diakses melalui <https://bantenhits.com/2021/04/28/ramai-soal-baiat-isis-fpi-banten-pernah-gelar-latihan-bela-negara-dan-sebar-1-000-merah-putih-hingga-perwira-tni-jadi-korban/> pada 19 Mei 2021.

Dadan M. Ramdan, “Iluni UI: Ego Sektoral Menghambat Penanganan Covid-19” *Kontan* 7 Agustus 2020. Diakses melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/iluni-ui-ego-sektoral-menghambat-penanganan-covid-19> pada 19 Mei 2021.

Dimas Ryandi, “Legislator Bingung, Masih Ada Kepala Daerah Izinkan Warganya Mudik” *Jawa Pos*, 23 April 2021. Diakses melalui <https://www.jawapos.com/nasional/politik/23/04/2021/legislator-bingung-masih-ada-kepala-daerah-izinkan-warganya-mudik/> pada 19 Mei 2021.

Kiki Syahnakri, “Pancasila Versus Liberalisme” *Kompas*, 23 April 2012. Diakses melalui <https://tekno.kompas.com/read/2012/04/23/02092868/Pancasila.Versus.Liberalisme?page=all> pada 19 Mei 2021.

Desilia Rahmadani, “Radikalisme Tidak Sesuai Dengan Nilai-Nilai Pancasila” *Universitas Widya Mandala Surabaya*. Diakses melalui <https://osf.io/wa6yb/download/?format=pdf> pada 19 Mei 2021.

“LSM Tolak Bela Negara, Curiga Bentuk Lain Wajib Militer” *Jawa Pos*, 14 Oktober 2015. Diakses melalui <https://www.jawapos.com/nasional/hankam/14/10/2015/lsm-tolak-bela-negara-curiga-bentuk-lain-wajib-militer/> pada 19 Mei 2021.

Ellyvon Pranita, „Setahun Covid-19 Indonesia Ini Inovasi Karya Anak Bangsa Lawan Pandemi Corona” *Kompas*, 3 Maret 2021. Diakses melalui <https://www.kompas.com/sains/read/2021/03/03/080100223/setahun-covid->

19-indonesia-ini-inovasi-karya-anak-bangsa-lawan-pandemi?page=all pada 18 Mei 2021.

Deti Mega Purnamasari, "Pemerintah Dorong Generasi Muda Jadi Guru" *Kompas*, 2 Februari 2021. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/02/14395021/pemerintah-dorong-generasi-muda-jadi-guru> pada 18 Mei 2021.

<https://www.worldometers.info/coronavirus/> yang diakses pada tanggal 15 Juli 2021 pukul 18.00 WIB

Pernyataan Kontroversial Menkes Terawan di Awal Pandemi Covid 19, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16290701/pernyataan-kontroversial-menkes-terawan-di-awal-pandemi-covid-19?page=all> pada 22 Agustus 2021.

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/11/104000165/hari-ini-dalam-sejarah--who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>.

Dawn Kopecki dan Berkeley Lovelace Jr, "Trump Blames WHO For Getting Coronavirus Pandemic Wrong, Threatens to Withhold Funding" *CNBC*, 7 April 2020. Diakses melalui <https://www.cnbc.com/2020/04/07/trump-blames-who-for-getting-coronavirus-pandemic-wrong-threatens-to-withhold-funding.html> pada 1 April 2021

"Risk Communication" *World Health Organization*, April 2018. Diakses melalui <https://www.who.int/risk-communication/pmac-2018/en/> pada 1 April 2021

Deti Mega Purnamasari, "Komitmen Bantu Kesetaraan Vaksin covid-19, Indonesia Pimpin Covax AMC" *Kompas*, 14 Januari 2021. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/14/09284451/komitmen-bantu-kesetaraan-vaksin-covid-19-indonesia-pimpin-covax-amc?page=all> pada 1 April 2021

<https://www.kompas.com/global/read/2021/08/02/065321870/unjuk-rasa-pecah-di-berlin-tolak-pembatasan-covid-19-600-orang-ditahan>

"Pertemuan ASEAN Comprehensive Recovery Framework Dalam Menyusun Kerjasama Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19" *Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN Indonesia*, 14 Juli 2020. Diakses melalui <https://meaindonesia.ekon.go.id/pertemuan-asean-comprehensive-recovery-framework-dalam-menyusun-kerjasama-pemulihan-ekonomi-pasca-pandemik-covid-19/> pada 2 April 2021.

Yohana Artha Uly, "Dampak Pandemi, Kegiatan Bisnis di ASEAN Diproyeksi Pulih Kuartal II 2021" *Kompas*, 1 Desember 2020. Diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2020/12/01/113800726/dampak-pandemi->

kegiatan-bisnis-di-asean-diproyeksi-mulai-pulih-kuartal-ii-2021?page=all pada 2 April 2021.

“Jurus Vietnam Tekan Pandemi Corona, Nol Kematian Pasien” *CNN Indonesia*, 24 Maret 2020. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200324162828-106-486559/jurus-vietnam-tekan-pandemi-corona-nol-kematian-pasien> pada 2 April 2021.

Jawahir Gustav Rizalm=, “Melihat Penerapan New Normal di Vietnam, Jerman, dan Selandia Baru” *Kompas*, 18 Mei 2020. Diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/18/113300665/melihat-penerapan-new-normal-di-vietnam-jerman-dan-selandia-baru?page=all> pada 2 April 2021.

Hendry Roris Sianturi, “Ini Data Baru Kewilayahan Laut Indonesia” *Gatra*, 10 Agustus 2018. Diakses melalui <https://www.gatra.com/detail/news/337332-Ini-Data-Baru-Kewilayahan-Laut-Indonesia> pada 2 April 2021

Ahadian utama, “Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Program KB di Indonesia” *VOA Indonesia*, 8 Mei 2020. Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/dampak-pandemi-covid-19-bagi-program-kb-di-indonesia/5411570.html> pada 2 April 2021

Martha Herlinawati, “Peneliti: Siapkan Strategi Pengelolaan DAS di Masa Normal Baru” *Antara*, 24 Juni 2020. Diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/1572294/peneliti-siapkan-segera-strategi-pengelolaan-das-di-masa-normal-baru> pada 2 April 2021

Callistasia Wijaya, “Dampak Covid-19: 2,7 Juta Orang Masuk Kategori Miskin Selama Pandemi, Pemulihan Ekonomi Butuh Waktu Lama” *BBC*, 17 Februari 2021. Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55992498> pada 2 April 2021.

Sigit Dwi Kusrahmadi, “Ketahanan Nasional”. Diakses melalui http://staffnew.uny.ac.id/upload/131655977/pendidikan/KETAHANAN+NASIONAL+UPT+MKU+Penting+Sekali+A1+04-02-06_0.pdf pada 1 April 2021.

Bela Negara: Pengertian, Unsur, Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Bela Negara, diunduh dari <https://www.wantannas.go.id/2018/10/19/bela-negara-pengertian-unsur-fungsi-tujuan-dan-manfaat-bela-negara/> pada 5 Februari 2020 pukul 16.35.

<https://covid19.go.id> diunduh pada 15 Juli 2021

Desi Purnamawati, “Pandemi Tidak Menyurutkan Inisiatif Inovasi Kesehatan di Ajang IHIA” *Antara*, 6 November 2020. Diakses melalui

<https://www.antaranews.com/berita/1824468/pandemi-tidak-menyurutkan-inisiatif-inovasi-kesehatan-di-ajang-ihia> pada 30 Maret 2021

“Penguatan” *KBBI Web*. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/kuat> pada 31 Maret 2021

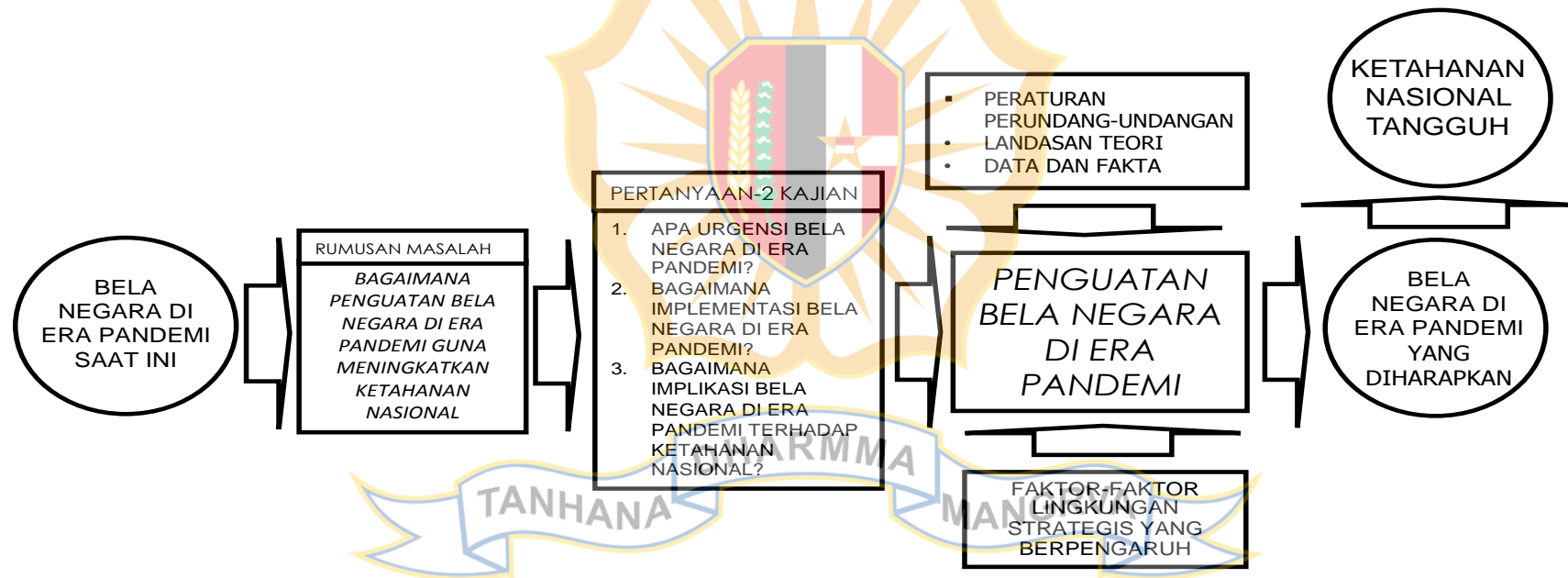
Rizal Setyo Nugroho, “Apa itu Pandemi Global Seperti yang Dinyatakan WHO Pada Covid-19?” *Kompas*, 12 Maret 2020. Diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/060100465/apa-itu-pandemi-global-seperti-yang-dinyatakan-who-pada-covid-19?page=all> pada 31 Maret 2021





ALUR PIKIR

PENGUATAN BELA NEGARA DI ERA PANDEMI GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL



RIWAYAT HIDUP



Kolonel Inf Raden Wahyu Sugiarto, S.I.P., M.Han. adalah Perwira Menengah TNI AD lulusan Akademi Militer Tahun 1992. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung, menyelesaikan strata 1 Ilmu Politik di Universitas Terbuka tahun 2003 dan strata 2 Prodi Strategi Kampanye Militer di Universitas Pertahanan tahun 2017. Pendidikan Militer Pengembangan Umum setelah lulus dari Akademi Militer adalah Pendidikan Sessarcab Inf Tahun 1992, Pendidikan Selapa If Tahun 2001, Pendidikan Seskoad Tahun 2006, lulus Pendidikan Sesko TNI Tahun 2016, dan Pendidikan Militer Pengembangan Spesialisasi yang pernah dilaksanakan adalah Sussar Para, Combat Intelijent, Suspa Intelijent, KIBI, Susdanki, Tarbinlatsat, Targumil, Spesialisasi Pelatih Infanteri, Tar Tih Raider, Susdanyon MC, Susdandim dan Dikdanrem tahun 2019. Tahun 2021 mengikuti Progam Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Lemhannas RI. Penulis dilahirkan di Bandung pada tanggal 13 Maret 1969, dari pasangan Bapak Raden Maharjo Suprpto (Alm) dan Ibu Titik Sudewi (Almh). Saat ini penulis menjabat sebagai Pamen Denma Mabasdad (staf khusus KSAD dalam rangka dik Lemhannas RI), penulis dikaruniai 2 orang putra yang bernama Bayu Avrianto Raksakadharma dan Dwi Aryo Yudhowirotama (Alm) dan 1 orang putri yang bernama Earlyta Arsyfa Salsabila dari seorang istri yang bernama Huzaema Ahmad Saleh.

Riwayat Jabatan, Jabatan yang pernah dijabat saat Perwira pertama adalah Dantonbant Kipan B Yonif 711 di Kota Poso dari tahun 1993 sd 1995, selanjutnya Kasi 1 intel Yonif 711 di Kota Palu, tahun 1996 menjadi Dankipan B Yonif 711 di kota Poso, Selanjutnya menjadi Danramil 1307-13 Kodim 1307 Poso dan Pasiops Kodim 1307 Poso sampai dengan Pendidikan Selapa IF tahun 2001. Selesai Pendidikan Selapa ditempatkan di Pusdikif dengan jabatan Gumil/Tih Gol VI dan Kasubdep

Taktik Reguler Departemen Taktik Pusdikif sampai dengan Pendidikan Seskoad tahun 2006. Tahun 2007 selesai Pendidikan seskoad ditempatkan sebagai Kasiops Rem 073 di Salatiga, selanjutnya tahun 2009 sd 2010 menjabat Danyonif 408 di Sragen. Tahun 2010 sd awal 2011 menjabat sebagai Dandodiklatpur Rindam IV di Klaten, selanjutnya ditugaskan kembali di Sragen sebagai Dandim 0725 Sragen sampai dengan awal tahun 2014, selanjutnya dijabat sebagai Waaslog Dam IV Dip di Semarang. Tahun 2015 awal menjabat jabatan gol 4 / Kolonel sebagai Aslog Dam XVII Cebdrawasih di Jayapura. Selesai Sesko TNI ditempatkan di Pussenif sebagai Pamen Ahli bidang pengembangan Organisasi Infanteri dan Dirbindik Pussenif. Bulan April 2018 menjabat sebagai Danrem 022 Pantai Timur di Sumatera Utara bagian timur, dengan makorem di Pematangsiantar. Juni 2020 dengan adanya reorganisasi di Pusdikter selanjutnya di jabatkan sebagai wadan pusdikter. Februari 2021 karena melaksanakan PPRA LXII selanjutnya di jabatkan sebagai pamen Denma Mabasad Staf khusus KSAD.

Riwayat penugasan, Operasi yang pernah dilaksanakan adalah Ops Seroja Timor Timur tahun 1994 s/d 1995. Ops Rajawali yakti Irian Jaya tahun 1998 s/d 1999. Opslihkam Poso tahun 1999 s/d 2000. Satgas Pam Rahwan Papua, satgas Pam Puter Papua dan Satgas Pamtas RI-PNG.

